

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran
Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017 – 2022 dalam Perspektif
Islam**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata 1 Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

Oktavia Nur Fadhillah

NIM : 2105026036

S1 EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An Oktavia Nur Fadhillah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Oktavia Nur Fadhillah

NIM : 2105026036

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Desember 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag.

NIP. 197308112000031004


Mashilal, SEI, M.Si.

NIP. 198405162019031005

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Oktavia Nur Fadhillah
NIM : 2105026036
Judul : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022 dalam Perspektif Islam

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : **24 Desember 2024** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 17 Oktober 2024

Ketua Sidang

Siti Nurngaini, S. Sos.I., M.Si
NIP. 198312012015032004

Sekretaris Sidang

Mashilal, S.E.I, M.Si
NIP. 198405162019032017

Penguji I

Dr. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP. 196701191998031002



Penguji II

Naili Saadah, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198803312019032012

Pembimbing I

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 197308112000031004

Pembimbing II

Mashilal, S.E.I, M.Si
NIP. 198405162019032017

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Tidak ada yang sulit, Allah telah memberikan kemudahan apabila manusia berusaha dan berserah hasilnya kepada Allah

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al – Insyirah ayat 5)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya. Dengan kerendahan hati yang mendalam penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan kontribusi kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada orang tua tercinta, Alm. Bapak Ahmad Nur Wakhid dan Ibu Endang Warsinah yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, doa, dukungan di setiap langkah yang penulis tempuh serta percaya bahwa penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab dengan baik.
2. Kepada Om A. Heru Setya Utama, Budhe M.M. Wartini, dan Tante Vera J. telah memberikan semangat, motivasi dan mensupport kebutuhan finansial bagi penulis selama masa perkuliahan.
3. Segenap keluarga besar yang memberikam dukungan dan doa kepada penulis selama ini.
4. Kepada dosen pembimbing Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag dan Bapak Mashilal, S.E.I., M.Si serta segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada sahabat tercinta penulis yaitu Aulia Az-zahra, Ayumi Isnaningsih, dan Sakila yang senantiasa memberikan dukungan, doa, semangat dan kebahagiaan hingga skripsi ini selesai.
6. Kepada teman – teman kelas Ekonomi Islam A 2021 yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktavia Nur Fadhillah

NIM : 2105026036

Jurusan : S1 Ekonomi Islam

Dengan penuh kesadaran, kejujuran, dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah dianalisis atau diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali pemikiran – pemikiran para ahli yang ada di dalam buku dan jurnal yang telah dikutip sebagai bahan referensi penulisan.

Semarang, 12 Desember 2024

Deklator



Oktavia Nur Fadhillah

2105026036

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987. Berikut penjelasanpedoman tersebut:

A. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas,
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah,
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas,
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah,
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah,
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah,
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah,
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
(-)	Fathah	A	A
(-)	Kasrah	I	I
(-)	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arabnya yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
(-) - ي	Fathah dan Ya	Ai	A dan i
(-) - و	Fathah dan wau	Au	A dan u

3. Vokal Panjang (maddah)

Vokal panjang atau maddah yang berlang harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	Ā	A dan garis diatas
يَ	Fathah dan ya	Ā	A dan garis diatas

ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis diatas
و	Dhammah dan waw	Ū	U dan garis diatas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t,
2. Ta marbutah mati mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h,
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu huruf ditulis dengan huruf (Al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika

hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi masalah serius bagi suatu daerah maupun negara karena dapat menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan terjadi karena sumber daya manusia, alam dan modal tidak memadai sehingga terjadi kemiskinan dan kesejahteraan menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan sumber data diperoleh dari data sekunder publikasi data Badan Pusat Statistik (BPS). Sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh karena seluruh populasi berpeluang menjadi sampel dan teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling. Analisis data yang digunakan yaitu uji regresi data panel. Olah data dilakukan dengan menggunakan software Eviews 10.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan, variabel IPM secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022.

Kata kunci: *Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat rahmat dan hidayah – Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang diajukan guna memenuhi salah satu tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafa'atnya di Yaumul Akhir. Skripsi berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022” disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi dapat selesai berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, III serta seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Nurudin, S.E., M.M. Selaku Kepala Jurusan S1 Ekonomi Islam dan Dosen Wali serta Bapak Ferry Khusnul Mubarak, M.A. Selaku Sekretaris Jurusan S1 Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag. Selaku pembimbing I dan Bapak Mashilal, S.E.I., M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa sabar telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan arahan untuk kelancaran penyusunan skripsi ini
5. Bapak Nurudin, S.E., M.M. Selaku dosen wali yang senantiasa selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga masa perkuliahan selesai.
6. Seluruh dosen pengajar program S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.

7. Seluruh pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan sehingga berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan terkhusus bagi penulis serta bagi pembaca.

Semarang, 13 Desember 2024

Penulis

Oktavia Nur Fadhilla

NIM. 2105026036

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan.....	12
1.4 Manfaat.....	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Landasan Teori	13
2.2 Penelitian Terdahulu.....	42
2.3. Kerangka Pemikiran.....	52
2.4. Hipotesis.....	52
BAB III.....	56
METODE PENELITIAN	56
3.1. Jenis Penelitian.....	56
3.2. Populasi dan Sampel	56
3.3. Teknik Pengumpulan Data	58
3.4. Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	58
3.5. Teknik Analisis Data	59
BAB IV	66
HASIL DAN PEMBAHASAN	66

4.1	Gambaran Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2017 – 2022	66
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data	69
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	77
BAB V	88
PENUTUP	88
5.1	Kesimpulan.....	88
5.2	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN I	100
LAMPIRAN II	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Persentase Kemiskinan Di Pulau Jawa Pada Tahun 2017 .	3
Tabel 1.2 Data Kependudukan dan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2017 – 2022	3
Tabel 1.3 Data IPM Provinsi di Pulau Jawa tahun 2017 – 2022.....	5
Tabel 1.4 Fenomena Persentase Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengeluaran Pemerintah 2017 – 2022.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	42
Tabel 4.1 Tabel Persentase Kemiskinan di Pulau Jawa.....	66
Tabel 4.2 Persentase Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	68
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif.....	69
Tabel 4.4 Hasil Regresi Data Panel <i>Common Effect Model (CEM)</i>	71
Tabel 4.5 Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	71
Tabel 4.6 Hasil Regresi Data Panel <i>Random Effect Model (REM)</i>	71
Tabel 4.7 Hasil Uji Chow	72
Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman	72
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas.....	73
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	74
Tabel 4. 11 Hasil Olah Data Regresi Data Panel	74
Tabel 4. 12 Hasil Uji t.....	75
Tabel 4.13 Tabel Hasil Uji F	77
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	15
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara terdiri dari 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Indonesia memiliki regulasi untuk penduduk, melindungi kelestarian alam dan warisan budaya. Dalam suatu negara terdapat regulasi untuk mengatasi permasalahan yang ada di suatu negara. Permasalahan suatu negara terdiri dari masalah ekonomi, geografi, agama, sosial maupun politik. Masalah ekonomi terdapat masalah ekonomi makro dan mikro. Masalah ekonomi makro terdiri dari inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB), kemiskinan dan neraca pembayaran internasional sedangkan masalah ekonomi mikro yaitu kenaikan harga, penawaran, teori harga, teori produksi, dan teori pasar.¹

Masalah ekonomi suatu negara salah satunya yaitu kemiskinan. Kemiskinan terjadi disebabkan oleh menurun tingkat produktivitas, motivasi belajar melalui pendidikan, pendapatan menurun, daya beli menurun, dan tingkat kesehatan rendah. Tingginya tingkat kemiskinan suatu negara maka akan menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.²

Kemiskinan merupakan masalah serius untuk suatu negara maupun individu. Negara dalam menyikapi kemiskinan membutuhkan alat ukur untuk mengetahui persentase penurunan maupun kenaikan kemiskinan. Adapun regulasi yang mengatur tentang kemiskinan yaitu terdapat UU No. 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin berisi tentang hak dan kewajiban, penanganan fakir miskin, tugas dan wewenang pemerintah pusat maupun daerah, sumber daya dan koordinasi dan pengawasan. Terdapat UUD Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 berbunyi fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah memiliki kesungguhan dalam menanggulangi kemiskinan tiap warga negara dengan cara membentuk lembaga dan mengatur regulasi³.

Kemiskinan secara konvensional menurut Schiller dalam Marien Pinontoan yaitu ketidakmampuan dalam memperoleh barang maupun pelayanan yang layak untuk memenuhi

¹ Darwis Harahap and S E I Ferri Alfadri, *Ekonomi Mikro Islam* (Merdeka Kreasi Group, 2022), 4.

² Herlin G. Yudawisastra et al., *Pengantar Ekonomi Pembangunan* (Badung: Intelektual Manifes Media, 2024), 132.

³ Badan Pengawas Keuangan, "UU Nomor 13 Tahun 2011," BPK RI, accessed October 29, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>.

keterbatasan kebutuhan sosial.⁴ Sedangkan kemiskinan dalam perspektif Islam menekankan bahwa golongan orang yang mampu dapat memberikan perhatian dan pembelaan serta optimal dalam menggali potensi yang dimiliki oleh individu maupun lembaga dalam menanggulangi kemiskinan sehingga kemiskinan dapat diminimalisir⁵. Dalam Q.S Adz – Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.

Penafsiran dari ayat di atas yaitu terdapat hak orang miskin pada harta benda orang yang kelebihan harta atau orang kaya. Oleh karena itu bagi orang yang memiliki kelebihan harta benda memiliki kewajiban dalam membantu orang yang membutuhkan melalui zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

Dalam Islam yang memiliki harta lebih dapat diberikan kepada yang membutuhkan. Kewajiban memberikan jaminan hidup layak tidak hanya negara tetapi juga kaum muslim melalui zakat yang wajib di tunaikan seperti zakat fitrah. Seperti yang telah tercantum dalam hadits Abu Daud Nomor 1406

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّرْعَاءِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضَلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَيَدُ
الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى فَأَعْطِ السُّفْلَى وَلَا تَعْجِزْ عَنِ نَفْسِكَ

Artinya: Dari Ahmad bin Hambal ke ‘Ubaidah bin Humaid At Taimi ke Abu Az Za’ra’ ia berkata bahwa Rasulullah telah bersabda ‘Terdapat tiga macam tangan diantaranya tangan Allah yang Maha Tinggi, tangan orang yang memberi setelah tangan Allah, dan tangan orang yang meminta yaitu tangan yang dibawah. Maka berikanlah harta dan jangan lemah untuk menafkahi dirimu.’⁶

⁴ Marien Pinontoan, “Konsep Dasar Kemiskinan Dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Suatu Kajian Teoretis, Pragmatis Dan Holistik,” *PT Nasya Expanding. Nasya Expanding Management*, 2020, 10.

⁵ Ahmad Ubaidillah, *Ekonomi Pembangunan Islam Untuk Indonesia Emas* (Nawa Litera Publishing, 2023), 56.

⁶ Ilmu Islam, “Hadits Abu Daud Nomor 1406,” Kumpulan Hadis, accessed November 11, 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/1354/hadits-abu-daud-nomor-1406>.

Tabel 1.1 Perbandingan Persentase Kemiskinan Di Pulau Jawa Pada Tahun 2017 – 2022

No.	Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata – rata
1.	Jawa Tengah	12,25	11,26	10,65	10,51	11,25	10,41	11,05
2.	Jawa Barat	7,86	7,30	6,89	7,79	8,69	8,35	7,81
3.	Jawa Timur	11,21	10,86	10,21	10,57	11,24	10,22	10,72
4.	D.I Yogyakarta	12,40	11,79	11,40	12,65	13,80	12,33	12,40
5.	D.K.I Jakarta	3,79	3,57	3,45	4,50	4,75	4,73	4,13
6.	Banten	5,62	5,34	5,04	6,24	7,28	6,77	6,05

Sumber dari BPS

Berdasarkan pada Tabel 1.1 persentase kemiskinan di Pulau Jawa memiliki rata – rata 8,69% dan rata – rata kemiskinan paling besar terdapat di Provinsi D.I Yogyakarta yaitu sebesar 12,40%, urutan kedua angka kemiskinan tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan persentase 11,05%. Kemudian terdapat urutan ketiga angka kemiskinan yaitu Provinsi Jawa Timur dengan persentase 10,72%. Urutan keempat terdapat Provinsi Jawa Barat dengan persentase 7,81%. Urutan kelima terdapat Provinsi Banten dengan persentase 6,05%, dan urutan terakhir terdapat Provinsi D.K.I Jakarta dengan persentase 4,13%.

Tabel 1.2 Data Kependudukan dan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2017 – 2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)
2017	34.258.000	4.197.490	12,25
2018	34.358.500	3.867.420	11,26
2019	34.552.500	3.679.400	10,65
2020	37.892.300	3.980.900	10,51
2021	36.516.000	4.109.750	11,25
2022	36.811.100	3.831.440	10,41

Sumber dari BPS

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tahun 2017 jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 34.258.000 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.197.490 maka dapat di persentasekan sebesar 12,25%. Lalu pada tahun 2018 jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 34.358.500 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.867.420 jiwa maka dapat di persentasekan sebesar 11,26%. Tahun 2019 jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 34.552.500 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.679.400 jiwa maka dapat di persentasekan sebesar 10,65%. Tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 37.892.300 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.980.900 jiwa maka dapat di persentasekan sebesar 10,51%. Tahun 2021 jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 36.516.000 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.109.750 jiwa maka dapat di persentasekan sebesar 11,25%. Tahun 2022 jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 36.811.100 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.831.440 jiwa maka dapat di persentasekan sebesar 10,41%.

Pembangunan adalah bentuk usaha pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan merupakan perubahan yang dilakukan oleh lembaga maupun negara dengan mengembangkan upayanya kearah yang lebih baik.⁷ Pembangunan yang diupayakan oleh pemerintah yaitu pembangunan setiap daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Fokus pembangunan setiap daerah berbeda – beda dapat dilihat dari urgensi daerah tersebut atau kebutuhan suatu daerah.⁸ Pembangunan manusia yang tinggi harus ikuti dengan sumber daya yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dimulai dengan mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan dan konsumsi yang layak. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja disuatu daerah karena tingkat produktivitas yang tinggi. Apabila tenaga kerja berkualitas diikuti oleh produktivitas yang tinggi akan mendatangkan pekerjaan yang layak dan kehidupan yang terjamin.⁹

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada sarana dan prasarana saja tetapi juga pada masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia dilakukan sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan suatu bangsa maupun daerah dapat dilihat melalui Indeks

⁷ Heliarta, *Pembangunan Nasional*, ed. Susilo (Semarang: ALPRIN, 2010), 2.

⁸ Masjudin Ashari, "Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013)," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (2016): 168.

⁹ H Amiruddin Idris, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Deepublish, 2016), 17–18.

Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai alat ukur kesuksesan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.¹⁰

Adapun ayat yang mengatur mengenai IPM yaitu Q.S A' Rad ayat 11 berbunyi:

لَهُ مَعْقِبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.¹¹

Tabel 1.3 Data IPM Provinsi di Pulau Jawa tahun 2017 – 2022

No	Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	D.I Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
1	2017	80,06	70,69	70,52	78,89	70,27	71,42
2	2018	80,47	71,3	71,12	79,53	70,77	71,95
3	2019	80,76	72,03	71,73	79,99	71,5	73,44
4	2020	81,92	72,61	71,88	79,95	73,04	74,41
5	2021	82,85	72,96	72,17	80,22	73,48	74,68
6	2022	82,77	73,63	72,8	80,65	74,05	75,25

Sumber dari BPS

Pada Tabel 1.3 IPM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 – 2019 merupakan terendah di antara 6 provinsi di pulau jawa. Pada tahun 2017 IPM di Jawa Timur sebesar 70,27, lalu mengalami peningkatan tahun 2018 dengan IPM 70,77 dan tahun 2019 meningkat dan nilai IPM sebesar 71,5. Lalu pada tahun 2020 – 2022 IPM terendah diantara 6 provinsi di pulau jawa. Pada tahun 2020 IPM di Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,88, lalu tahun 2021 IPM di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari 71,88 menjadi 72,17 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari 2021 – 2022 dari 72,17 menjadi 72,8.

Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kesehatan, pendidikan, standar hidup layak, pertumbuhan ekonomi, IPM dan pengeluaran pemerintah. Kemiskinan adalah suatu kondisi masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam

¹⁰ Ika Okta Kirana, Zulaini Masruro Nasution, and Anjar Wanto, "Analisis Metode Trend Parabolic Untuk Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia," in *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*, 2019, C-1.

¹¹ Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag," Q.S Ar Radd ayat 11, accessed November 2, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

kehidupan sehari – harinya. Kemiskinan telah menjadi masalah penting bagi pertumbuhan suatu negara apabila suatu negara memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi dibutuhkan penanggulangan kemiskinan secara sistematis. Kemiskinan dapat terjadi akibat rendahnya sistem Pendidikan, kesehatan, dan motivasi dari lingkungan sekitarnya.¹²

Tabel 1.4 Fenomena Persentase Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Tahun 2017 – 2022

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	IPM	Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)	Kemiskinan (Persen)
2017	4,52	70,52	82.460.035.621,00	12,25
2018	4,59	71,12	76.605.675.602,00	11,26
2019	5,17	71,73	86.728.086.011,00	10,65
2020	-7,71	71,87	84.708.281.428,00	10,51
2021	2,30	72,16	69.335.473.585.452,00	11,25
2022	4,26	72,79	81.981.450.643.126,00	10,41

Sumber dari BPS diolah

Tabel 1.4 memberikan gambaran terkait fenomena persentase pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dari tahun 2017 – 2022. Dari data tabel di atas terdapat fenomena antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Menurut Yasirwan, Muhammad Luis dan Nurhayati Harahap persentase kemiskinan berkurang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi meningkat. Kenaikan angka kemiskinan disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan output agregatnya dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan rata – rata masyarakat.¹³ Data menunjukkan pada tahun 2017 – 2018 kemiskinan mengalami penurunan dari 12,25% menjadi 11,26% diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dari 4,52% menjadi 4,59%. Dari tahun 2018 – 2019 kemiskinan mengalami penurunan dari 11,26% menjadi 10,65% diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 4,59% menjadi 5,17%. Fenomena antara kemiskiaan dengan pertumbuhan ekonomi terletak pada tahun 2019 – 2020 kemiskinan mengalami penurunan dari 10,65% menjadi 10,51% sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 5,17% menjadi -7,71%. Hal ini disebabkan oleh situasi global terjadinya covid – 19 diseluruh negara yang membawa ancaman peningkatan

¹² Keppi Sukes, *Gender Dan Kemiskinan Di Indonesia* (Universitas Brawijaya Press, 2015), 193.

¹³ Rifqi Rivaldi, "EKONOMI ISLAM DALAM PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA DAN M. NEJATULLAH SIDDIQI," *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021): 112.

kemiskinan dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Fenomena terjadi pada tahun 2020 – 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan signifikan dari -7,71% menjadi 2,30% sedangkan kemiskinan mengalami kenaikan dari 10,51% menjadi 11,25%. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat diikuti oleh penurunan kemiskinan, sedangkan data kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 – 2021 angka pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan cukup signifikan tidak diikuti oleh penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2021 – 2022 kemiskinan mengalami penurunan dari 11,35% menjadi 10,41% diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 2,30% menjadi 4,26%.

Tabel 1.4 memberikan gambaran nilai IPM terhadap kemiskinan dari tahun 2017 – 2022. Dari data tabel di atas dapat dilihat Dari data tabel di atas terdapat fenomena antara IPM dengan kemiskinan. Menurut Misfi Laili Rohmi, Tiara Juliana Jaya dan Mahfudz Reza Fahlevi mengentaskan kemiskinan membutuhkan perubahan dan perbaikan dari kinerja pembangunan manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Data menunjukkan pada tahun 2017 – 2018 kemiskinan mengalami penurunan dari 12,25% menjadi 11,26% diikuti dengan peningkatan IPM dari 70,52% menjadi 71,12%. Dari tahun 2018 – 2019 kemiskinan mengalami penurunan dari 11,26% menjadi 10,65% diikuti dengan peningkatan IPM dari 71,12% menjadi 71,73%. Data menunjukkan pada tahun 2019 – 2020 kemiskinan mengalami penurunan dari 10,65% menjadi 10,51% sedangkan IPM mengalami penurunan dari 71,73% menjadi 71,87%. Fenomena terjadi pada tahun 2020 – 2021 kenaikan IPM 71,87% menjadi 72,16% namun angka kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 10,51% menjadi 11,25%. Peningkatan IPM disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia dan pembangunan yang ada di daerah tersebut sehingga angka kemiskinan dapat menurun, hal ini tidak sejalan dengan data tabel diatas pada pengaruh IPM terhadap kemiskinan tahun 2020 – 2021 yaitu IPM meningkat namun diikuti dengan peningkatan kemiskinan. Hal ini terjadi disebabkan oleh kondisi global sedang beradaptasi dan mulai memulihkan perekonomian negara. Pada tahun 2021 – 2022 kemiskinan mengalami penurunan dari 11,35% menjadi 10,41% diikuti peningkatan IPM dari 72,16% menjadi 72,79%.

Tabel 1.4 memberikan gambaran besaran pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan dari tahun 2017 – 2022. Dari data tabel di atas terdapat fenomena antara pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan. Menurut Meiran Panggabean dan Eka Ria Lestari Matondang

¹⁴ Misfi Laili Rohmi, Tiara Juliana Jaya, and Mahfudz Reza Fahlevi, "Pengaruh Pembiayaan Syariah Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh: Analisis Data Panel," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1409–15.

anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan fasilitas publik tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, seperti pembangunan maupun pembenahan sarana dan prasarana.¹⁵ Data menunjukkan pada tahun 2017 – 2018 kemiskinan mengalami penurunan dari 12,25% menjadi 11,26% diikuti dengan penurunan pengeluaran pemerintah dari 82.460.035.621 menjadi 76.605.675.602. Dari tahun 2018 – 2019 kemiskinan mengalami penurunan dari 11,26% menjadi 10,65% diikuti dengan peningkatan pengeluaran pemerintah dari 76.605.675.602 menjadi 86.728.086.011. Pada tahun 2019 – 2020 kemiskinan mengalami penurunan dari 10,65% menjadi 10,51% sedangkan pengeluaran pemerintah mengalami penurunan dari 86.728.086.011 menjadi 84.708.281.428. Fenomena terjadi pada tahun 2020 – 2021 kemiskinan mengalami kenaikan dari 10,51% menjadi 11,25% diikuti dengan kenaikan pengeluaran pemerintah dari 84.708.281.428 menjadi 69.335.473.585.452. Hal ini terjadi karena negara sedang membutuhkan anggaran untuk pemulihan kondisi global yang tidak stabil akibat covid – 19. Pada tahun 2021 – 2022 kemiskinan mengalami penurunan dari 11,35% menjadi 10,41% diikuti peningkatan pengeluaran pemerintah dari 69.335.473.585.452 menjadi 81.981.450.643.126.

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya pertumbuhan ekonomi, IPM dan pengeluaran pemerintah. Menurut Bryant and White dalam Khusaini menyatakan bahwa terdapat empat aspek yang berkaitan dengan peningkatan kualitas manusia sesuai dengan kapasitas. Pertama, pembangunan dilakukan berdasarkan kapasitas (*capacity*), menyusun skala prioritas untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Kedua, pembangunan dilakukan berdasarkan pemerataan (*equity*). Ketiga, pembangunan dilakukan dari pemberi kuasa dan wewenang (*empowerment*) lebih besar dari rakyat. Keempat, pembangunan yang terus melakukan peningkatan yaitu dengan melakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable*). Menurunnya kemiskinan dapat di mulai dengan pembangunan sumber daya manusia dan pengelolaan suatu negara terhadap kekayaan sumber daya manusia.¹⁶

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan per kapita, ekspor, impor, investasi dalam negeri maupun asing. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan menurunkan angka kemiskinan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu parameter penting dalam suatu negara karena

¹⁵ Meiran Panggabean and Eka Ria Lestari Matondang, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017," *Prosiding SATIESP*, 2019, 161.

¹⁶ Ivan Khusaini, "Pembangunan Manusia Indonesia," (*No Title*), n.d., 193.

meliputi beberapa aspek diantaranya pendapatan per kapita dan Produk Domestik Bruto (PDB) pada skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala daerah. Menurut Awal N. Bahasoan dalam bukunya berjudul Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur Tingkat kesejahteraan suatu negara maupun daerah.¹⁷

Penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan yang dilakukan oleh Ria Kusumaningrum, Umi Kulsum, Marsha Siti Aisyah Hafsari dan Della Rizki Ananda dengan teknik analisis regresi linear berganda penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2002 – 2021. Hal ini disebabkan meningkatnya GDP disebabkan dari kalangan menengah keatas, sehingga orang yang kaya semakin kaya dan angka kemiskinan semakin bertambah. Hal ini terjadi karena distribusi pendapatan tidak merata terhadap hasil ekonomi oleh seluruh lapisan masyarakat yang menyebabkan ketimpangan pendapatan.¹⁸ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Reza Mu'tiqul Azmi dan Jihad Lukis Panjawa dengan metode yang digunakan yaitu *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) yang dikembangkan oleh Pesaran dan Shin. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka pendek sedangkan untuk estimasi jangka panjang pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur.¹⁹

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan parameter untuk mengukur progres kemajuan suatu negara maupun daerah. Menurut Shiddiqi dalam Ahmad Ubaidillah, negara berperan dalam memberikan jaminan etika ekonomi dan bisnis Islam melalui bidang pendidikan, menciptakan mekanisme pasar yang sehat sesuai dengan regulasi yang berlaku,

¹⁷ Awal N Bahasoan, *FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SULAWESI TENGAH* (Penerbit Qiara Media, 2022), 2–3.

¹⁸ Ria Kusumaningrum, Umi Kulsum, and Marsha Siti Aisyah Hafsari, "PERSPEKTIF EKONOMI DAN BISNIS ISLAM MENGENAI PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002-2021," *SAHID BUSINESS JOURNAL* 2, no. 02 (2023): 72.

¹⁹ Reza Mu'tiqul Azmi and Jihad Lukis Panjawa, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan," *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2, no. 6 (2022): 137.

pembentukan modal di bidang produksi guna meningkatkan pertumbuhan dan jaminan keadilan sosial, pembenahan ketersediaan sumber daya dan distribusi pendapatan yang adil melalui proses bantuan langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan sumber daya serta pendistribusian pendapatan.²⁰ Penelitian yang berkaitan dengan IPM terhadap kemiskinan yang dilakukan oleh Ema Dian Ristika, Wiwin Priana Primandhana, dan Mohammad Wahed dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan model *Ordinary Least Square* (OLS) penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh IPM terhadap kemiskinan memiliki hubungan positif dan signifikan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan keahlian sumber daya manusia yang dimiliki mengalami peningkatan sehingga produktivitas masyarakat meningkat dapat meningkatkan inovasi berwirausaha serta memperoleh pendapatan yang lebih baik. Hal yang dilakukan oleh Pemprov Jatim dalam meningkatkan produktivitas masyarakat yaitu mengadakan program MJC (*Millennial Job Centre*) program ini diadakan untuk meningkatkan jiwa kompetitif para pemuda yang berfokus pada “*On The Job Learning*” dengan memberikan kesempatan kerja sementara baik berupa proyek maupun pekerjaan berbayar dari Perusahaan maupun institusi.²¹ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dio R. Mandey, Daisy S. M. Engka, dan Hanly F. Dj. Siwu teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa IPM memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam penelitian ini indikator penting dalam IPM seperti pendidikan, kesehatan dan pendapatan yang meningkatkan disebabkan oleh tinggi jiwa komopetitif dari masyarakat dan mampu berinovasi dalam bidang professional. Apabila dari sisi kesehatan, pendidikan dan produktivitas suatu masyarakat yang tinggi dapat menurunkan angka kemiskinan suatu daerah maupun negara.²²

Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya pengeluaran pemerintah tidak lepas dari pengeluaran untuk sektor kesehatan dan Pendidikan. Sektor kesehatan dan Pendidikan merupakan sektor penting untuk meningkatkan dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah maupun negara. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang

²⁰ Ubaidillah, *Ekonomi Pembangunan Islam Untuk Indonesia Emas*, 283.

²¹ Ema Dian Ristika, Wiwin Priana Primandhana, and Mohammad Wahed, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur,” *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 2 (2021): 135.

²² Dio Refelindo Mandey, Daisy S M Engka, and Hanly F Dj Siwu, “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Talaud,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23, no. 1 (2023): 46.

memadai di setiap daerah maupun negara.²³ Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Dewa Pratama Putra dan Ririt Iriani Sri Setiawati menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS 25 penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan memiliki hubungan positif dan signifikan di Kabupaten Gresik. Semakin bertambahnya pengeluaran pemerintah semakin meningkat angka kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ningsi Goni, Josep Bintang Kalangi dan Krest D. Tolosang menggunakan analisis regresi linear berganda dengan model *Ordinary Least Square* (OLS). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2009 – 2021. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dapat menjadi salah satu faktor penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.²⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian dan teori yang digunakan. Peneliti memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian karena IPM di Jawa Tengah pada tahun 2020 – 2022 menjadi indeks terendah diantara enam provinsi di Jawa Tengah. Teori yang digunakan yaitu I-HDI (Islamic Human Development Index). Perhitungan I – HDI dari data yang komprehensif lima unsur maqashid syariah *al dharuriyah al khams*. Tak hanya itu Kemiskinan digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu negara maupun daerah dengan beberapa faktor yang harus diperhatikan salah satunya pertumbuhan ekonomi, IPM dan pengeluaran pemerintah. Apabila kemiskinan meningkat maka akan mempengaruhi sendi – sendi perekonomian. Hal ini terjadi karena penduduk miskin memiliki fasilitas kesehatan yang terbatas dan daya beli yang rendah.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang telah dibahas ditemukan fenomena gap dan research gap terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu yang dibuktikan dengan research gap sehingga diperlukan penelitian kembali untuk membahas hal tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022”**

1.2 Rumusan Masalah

²³ Zul Fadli et al., *Ekonomi Makro: Teori-Teori Pengantar* (CV. Gita Lentera, 2023), 31.

²⁴ Ningsi Goni, Josep Bintang Kalangi, and Krest D Tolosang, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 22, no. 5 (2022): 130.

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017 – 2022?
2. Bagaimana pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017 – 2022?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017 – 2022?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017 – 2022
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017 – 2022
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2017 – 2022

1.4 Manfaat

Penelitian ini bermanfaat bagi 3 pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis terkait dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan atau pengetahuan baru sehingga masyarakat dapat memahami yang berkaitan dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Kemiskinan

Menurut Mustopadidjaja dalam buku Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh Marien Pinontoan mendefinisikan paradigma sebagai dasar teori maupun cara pandang yang dilandasi nilai – nilai berisi teori pokok, konsep, asumsi dan metodologi, maupun pendekatan secara teoritis dan praktis untuk menanggapi suatu permasalahan terkait pengembangan ilmu atau Upaya memecahkan masalah untuk kemajuan hidup manusia. Terdapat dua paradigma *grand theory* tentang kemiskinan yaitu paradigma neo liberal dan demokrasi sosial. Terdapat perbedaan di antara kedua paradigma tersebut di antaranya:²⁵

2.1.1.1 Paradigma Neo Liberal

Suharto dalam buku Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh Marien Pinontoan mengatakan bahwa unsur penting dalam paradigma neo liberal adalah kebebasan individu. Kemiskinan dianggap sebagai persoalan individu yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Pada paradigm neo liberal kemiskinan akan hilang apabila memperluas kekuatan pasar dan pertumbuhan ekonomi didorong semakin meningkat.²⁶

2.1.1.2 Paradigma Demokrasi Sosial

Suaib dalam buku Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada teori demokrasi sosial memandang bahwa kemiskinan bukan persoalan individu melainkan struktural. Penyebab kemiskinan karena terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat minim akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan. Pada paradigma demokrasi sosial tanpa adanya sumber keuangan yang cukup akan menghilangkan kebebasan karena keterbatasan dan menghilangkan kemampuan individu dalam menentukan pilihan.²⁷

²⁵ Marien Pinontoan, "Konsep Dasar Kemiskinan Dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat," Penerbit NEM, 2020, 21.

²⁶ Pinontoan, 22.

²⁷ M Si Suaib, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Penerbit Adab, 2023), 169.

2.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan menurut BPS adalah kondisi manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari – hari. Kebutuhan pokok manusia berupa sandang pangan dan papan. Kemiskinan yaitu ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang rata – rata pengeluaran per kapita berada di bawah garis kemiskinan.²⁸

Kemiskinan menurut Nasikun dalam Syamsuri yaitu rendahnya pendidikan, produktivitas dan inovasi dalam bekerja, keterbatasan sumber daya alam maupun manusia, keterbatasan lapangan kerja, modal dan beban keluarga. Sedangkan menurut Ragnar Nukse pada gambar 2.1 dalam Syamsuri menjelaskan bahwa kemiskinan muncul karena ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan dan ketertinggalan. Dari ketiga unsur tersebut apabila kekurangan modal maka akan menurunkan produktivitas dan menyebabkan rendahnya pendapatan. Apabila pendapatan rendah maka tabungan dan investasi ikut menurun.²⁹

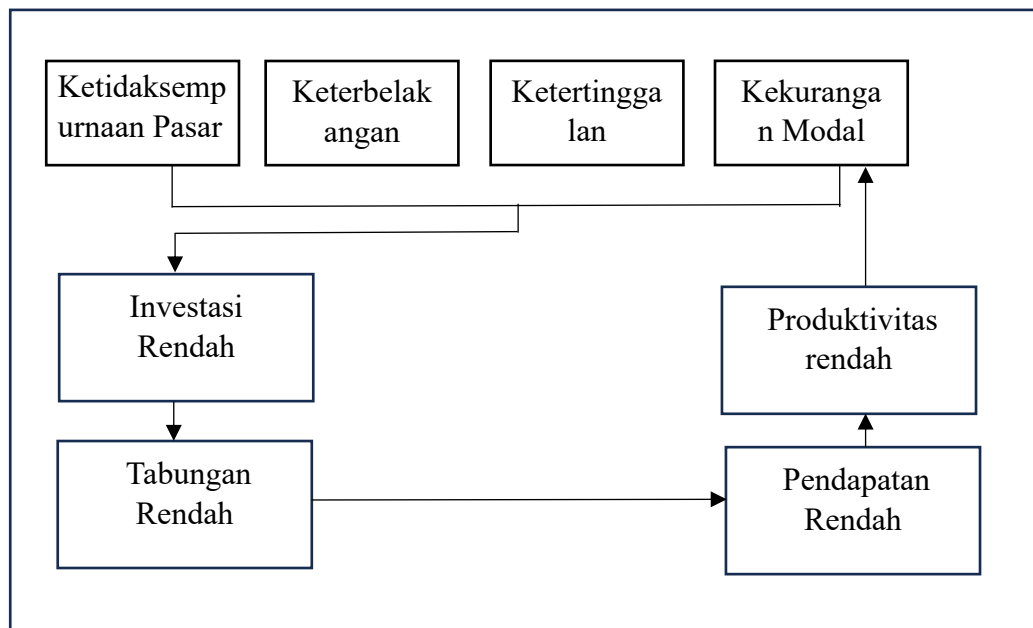
Kemiskinan dapat diukur melalui standar hidup layak, artinya dapat dilihat kemampuan seseorang maupun keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Pengertian kemiskinan lebih lanjut adalah tidak mampu terpenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar melalui standar hidup layak. Kebutuhan dasar yang dimaksud yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan pokok dapat disesuaikan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.³⁰

²⁸ Badan Pusat Statistik, “Kemiskinan,” Badan Pusat Statistik, accessed March 29, 2024, [https://jakarta.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#:~:text=Dengan pendekatan ini%20 kemiskinan dipandang,perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.](https://jakarta.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#:~:text=Dengan%20pendekatan%20ini%20kemiskinan%20dipandang,perkapita%20perbulan%20dibawah%20garis%20kemiskinan.)

²⁹ Syamsuri, *Ekonomi Pembangunan Islam (Sebuah Prinsip, Konsep Dan Asas Falsafahnya)* (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018), 213.

³⁰ Indra Maipita, *Memahami Dan Mengukur Kemiskinan* (Absolute Media, 2013), 10.

Gambar 2.1 Menurut Ragnar Nurkse dalam Herlin G. Yudawisastra ³¹



2.1.2.1 Jenis – jenis Kemiskinan

Adapun jenis – jenis kemiskinan dalam H.M Harun Samsudin terdapat enam jenis kemiskinan diantaranya:³²

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dialami oleh keluarga atau sekelompok orang yang penghasilannya berada di bawah garis kemiskinan. Pendapatan yang diperoleh tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

2. Kemiskinan Subjektif

Kemiskinan subjektif adalah kemiskinan terjadi karena pengaruh dari lingkungan tempat tinggal dan pemikiran sendiri bahwa kebutuhan yang terpenuhi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kemiskinan subjektif berkaitan erat dengan mental, lingkungan sosial dan emosional seseorang.

3. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan terjadi akibat kebijakan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik belum merata untuk semua lapisan masyarakat.

³¹ Yudawisastra et al., *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, 131.

³² Harun Samsudin, DIMAS SADIMAN, and IRWAN P RATU BANGSAWAN, *Kajian Sosial: Menuju Kemiskinan Satu Digit* (Bappeda Litbang Kabupaten Banyuwasin, 2020), 15–19.

Kebijakan tersebut dapat menciptakan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan.

4. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan terjadi akibat kelangkaan dari sumber daya alam sekitar. Hal ini terjadi karena rendahnya produktivitas masyarakat yang rendah.

5. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan terjadi akibat budaya, kebiasaan dan sikap masyarakat yang santai. Masyarakat yang tidak mau bekerja lebih keras dan mengikuti perkembangan teknologi modern untuk menaikkan taraf hidup.

6. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan terjadi akibat struktur sosial tidak dapat terhubung dengan sumber daya yang tersedia. Masyarakat tidak dapat mengelola sumber daya yang tersedia sehingga tidak dapat menikmati sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan.

2.1.2.2 Faktor – faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor – faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro dalam Aris Soelistyo yaitu:

33

1. Secara mikro, timbul kemiskinan karena terdapat ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Kemiskinan muncul karena ketimpangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penurunan kualitas SDM berarti menurun produktivitas dan perolehan upah yang rendah. Rendahnya kualitas SDM menjadi penyebab penurunan motivasi belajar untuk menempuh pendidikan di kalangan penduduk miskin selain itu terdapat faktor diskriminasi dan keturunan.
3. Kemiskinan terjadi karena terdapat perbedaan akses dalam modal.

2.1.2.3 Indikator Kemiskinan

1. Persentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI – P0) adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) merupakan parameter rata – rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin

³³ Aris Soelistyo, *MACROECONOMETRIC MODEL: Kemiskinan, Ketimpangan, Distribusi Pendapatan Dan Kebijakan Macropudential Di Indonesia* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 21.

terhadap garis kemiskinan. Apabila semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata – rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index – P2) memberikan deskripsi yang berkaitan dengan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Apabila semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

2.1.2.4 Kemiskinan Dalam Perspektif Islam

Menurut Al – Ghazali dalam Nurul Huda kemiskinan yaitu ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Apabila dapat menjangkau barang yang tidak dibutuhkan maka tidak masuk dalam golongan miskin. Sedangkan menurut Muhammad Abduh dalam Reni Ria Armayani Hasibuan, dkk dalam buku *Ekonomi Mikro Islam* menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan Sunatullah dan untuk mengatasi kemiskinan dengan Sunatullah, penyebab kemiskinan menurut Muhammad Abduh yaitu karena tidak mampu bekerja, mudah putus asa, malas, pengangguran dan rendahnya pendidikan.³⁴

Menurut M. Umer Chapra dalam buku *Islam and The Islamic Challenge* membahas tentang tantangan ekonomi dalam negara muslim serta menjelaskan mengenai aktualisasi konsep *falah* dan *hayatan thoyyibatan*. Konsep yang berkaitan dengan Islam diterapkan umat muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan moral, persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, dengan memanfaatkan sumber daya langka untuk pengentasan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Chapra menganalisis kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di negara berkembang disebabkan oleh peraturan yang diambil berdasarkan perspektif strategi sekuler dapat berupa kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan.³⁵

Menurut Yusuf al – Qaradhawi kemiskinan disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, apabila manusia tidak memiliki wawasan dan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup tergolong dalam kemiskinan karena pendidikan menjadi kebutuhan pokok manusia dan modal meraih kesejahteraan hidup. Terbatasnya lapangan pekerjaan, yaitu masyarakat kesulitan dalam memperoleh pekerjaan untuk

³⁴ M E I Reni Ria Armayani Hasibuan, S E I Nurul Jannah, and M E I Angga Syahputra, *EMIS (Ekonomi Mikro Islam)* (Merdeka Kreasi Group, 2022), 15.

³⁵ M Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992).

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keterbatasan lapangan pekerjaan dapat meningkatkan pengangguran dan kemiskinan di suatu daerah. Kemudian penyebab kemiskinan dapat disebabkan adanya malas bekerja, yaitu mental masyarakat yang tidak ingin maju untuk merubah nasib dengan meningkatkan taraf hidup. Keterbatasan sumber daya, kemiskinan terjadi apabila sumber daya modal dan sumber daya alam di suatu daerah terbatas. Sumber daya alam yang melimpah tetapi tidak diimbangi dengan sumber daya modal yang mendukung pengelolaan sumber daya alam menyebabkan tidak maksimal dalam mengelola dan menurunkan angka kemiskinan.

Adapun strategi Islam dalam mengentas kemiskinan, yaitu:

Pertama, Islam memberikan manfaat luas bagi masyarakat (*pro – poor growth*) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai *pro – poor growth* yaitu dengan melakukan pelarangan riba dan mendorong sektor riil. *Kedua*, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak (*pro – poor getting*). Untuk mendorong *pro – poor getting* yaitu dengan cara disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintah yang baik, dan penggunaan anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat. *Ketiga*, pembangunan infrastruktur yang merata. Infrastruktur menjadi dampak eksternal positif dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. *Keempat*, dorongan Islam dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu penyediaan pelayanan publik dasar untuk kepentingan masyarakat (*pro – poor public service*). Bidang pelayanan publik yang menjadi perhatian Islam yaitu bidang birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. *Kelima*, dorongan Islam kepada masyarakat miskin dalam bentuk kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan (*pro – poor distribution*). Indikator utama dalam Islam yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, infaq, wakaf, serta menganjurkan qardhul hasan.³⁶

Menurut Yusuf Al – Qardawy dalam Jakra Hadepa Riyadi dan Wahida Rahma Noor Malitasari, kemiskinan dapat berbahaya bagi umat muslim di antaranya:

1. Bahaya kemiskinan terhadap akidah, yaitu keraguan dari ketidakadilan yang diberikan oleh Allah karena goyangnya akidah seseorang terhadap Sunatullah.

³⁶ Sri Budi Cantika, "Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam," *Journal of Innovation in Business and Economics* 4, no. 2 (2013): 105–8.

2. Bahaya kemiskinan terhadap etika dan moral, yaitu pengaruh seseorang untuk melakukan tindakan asusila dan tindakan kriminal untuk keluar dari kemiskinan.
3. Bahaya kemiskinan dalam kehidupan rumah tangga
4. Bahaya kemiskinan dalam masyarakat dan ketentramannya.

Adapun ayat Al – Qur’an yang menyiratkan untuk mendermakan harta dan beribadah kepada Allah agar terhindar dari kemiskinan Q.S Nuh 10 – 12 , yaitu:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَبْنَاءٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

Artinya:

10. Lalu, aku berkata (kepada mereka), “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Ssesungguhnya Dia Maha Pengampun.
11. (Jika kamu memohon ampun) niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu,
12. memperbanyak harta dan anak – anakmu, serta mengadakan kebun – kebun dan sungai – sungai untukmu.”³⁷

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah tahap perekonomian negara secara berkelanjutan menuju kearah lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan volume perekonomian yang dimasukkan dalam kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator kesuksesan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah maka akan meningkatkan pertumbuhan output suatu wilayah. Apabila perkembangan suatu wilayah menuju kearah yang lebih baik maka wilayah tersebut berpeluang menjadi sektor prioritas pembangunan.³⁸

Menurut Sukirno dalam Ratna Ekasari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan mengukur total pendapatan perkapita dalam perekonomian. PDRB yaitu seluruh nilai tambah yang ada di segala kegiatan perekonomian suatu wilayah, tanpa mengetahui

³⁷ Kementerian Agama, “Q.S Nuh Ayat 10 - 12,” Qur’an Kemanag, accessed November 11, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

³⁸ Mariana Tenreng and Arifin Idris, “Ekonomi Makro,” 2022, 296.

pemilik faktor produksi, baik penduduk wilayah maupun penduduk wilayah lain.³⁹ Menurut Todaro dalam Zainul Bahri dan Vinni Aprilianti pertumbuhan ekonomi ditandai dengan perbaikan kualitas modal melalui investasi maupun sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kuantitas produktivitas masyarakat melalui pengembangan inovasi dan kemajuan teknologi.⁴⁰

2.1.3.1 Manfaat Pertumbuhan Ekonomi

Adapun manfaat dari pertumbuhan ekonomi menurut Mariana Tenreng dan Arifin Idrus diantaranya:⁴¹

1. Tingginya pendapatan untuk pekerja dan perusahaan.
2. Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan pendapatan pajak
3. Berkurangnya utang pemerintah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi defisit anggaran pemerintah karena meningkatnya penerimaan pajak.
4. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan lapangan kerja dan berkurangnya angka pengangguran
5. Pertumbuhan ekonomi menciptakan dampak positif diantaranya mendorong investor untuk berinvestasi di negara yang pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan, hal ini menjadikan suatu negara dianggap menguntungkan dan potensial.
6. Menurunkan kemiskinan absolut apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

³⁹ S E Ratna Ekasari, *Pengantar Ekonomi Makro* (AE Publishing, 2023), 56.

⁴⁰ S E Zainul Bahri, D R Vinni Aprilianti, and M E SSTP, *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, Dan Blue Economy* (Nas Media Pustaka, 2023), 8.

⁴¹ Tenreng and Idris, "Ekonomi Makro," 305.

2.1.3.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Adapun faktor maupun memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi:⁴²

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang memadai sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apabila sumber daya manusia suatu negara memiliki jiwa kompetitif dan didukung oleh infrastruktur yang memadai akan menjadi nilai tambah suatu negara. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang melimpah merupakan anugerah bagi suatu negara yang beruntung memilikinya. Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagian besar berasal dari negara berkembang. Apabila melimpahnya sumber daya alam tidak disertai dengan kemampuan pengelolaan yang baik dari sumber daya manusia maka akan menjadi kerugian besar suatu negara. Oleh karena itu melimpahnya sumber daya alam turut dijaga kelestariannya dan melakukan pembaharuan agar tidak terjadi kelangkaan.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Transformasi teknologi yang berawal dari menggunakan tenaga manusia sekarang beralih menggunakan alat yang telah dirancang dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan manusia. Untuk membuat dan merancang alat yang canggih membutuhkan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Teknologi yang canggih dapat membantu pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Bantuan teknologi yang canggih dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

4. Budaya

Dampak positif budaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu kualitas kerja dari sumber daya manusia. Kualitas kerja yang memberikan dampak positif diantaranya yaitu kerja keras, kerja cerdas, jujur, ulet, dan jiwa gotong royong. Adapun dampak negatif yang menghambat pertumbuhan ekonomi yaitu sikap patriarki, egois, dan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

2.1.2.3 Hambatan Pertumbuhan Ekonomi

Adapun yang menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi diantaranya sebagai berikut:⁴³

⁴² Tenreng and Idris, 307–8.

⁴³ Rully Wurarah et al., *Ekonomi Pembangunan* (CV Rey Media Grafika, n.d.), 45–48.

1. Menurunnya kondisi kesehatan dan rendahnya tingkat pendidikan
Produktivitas yang rendah dapat mempengaruhi tingkat pendidikan suatu negara. Akses pendidikan dan kesehatan yang rendah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini diakibatkan karena kondisi fisik dan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi menurun sehingga tidak sesuai target.
2. Kurangnya infrastruktur
Infrastruktur yang biasanya menjadi hambatan negara berkembang yaitu kurang memadainya fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, jalan, dan sekolah. Infrastruktur yang tidak memadai menjadi hambatan karena kurang efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan serta membutuhkan biaya lebih banyak untuk sampai tujuan.
3. Ketidakstabilan politik
Ketidakstabilan politik berpengaruh terhadap investasi suatu negara. Apabila negara tingkat stabilitas politiknya rendah maka akan menurunkan jumlah investor yang akan berinvestasi ke negara tersebut. Semakin stabil politik negara tersebut maka akan meningkatkan investasi asing masuk ke negara tersebut dan dapat menambah pendapatan negara maupun nasional.
4. Kerangka kerja institusi
Penegak hukum dan regulasi hukum tidak cukup melindungi hak. Apabila kerangka kerja institusional berkurang maka dapat mempengaruhi kemajuan dan investasi suatu negara.

2.1.3 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Indikator pertumbuhan ekonomi terdiri dari Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, dan konsumsi rumah tangga.⁴⁴ Berikut penjelasan dari indikator pertumbuhan ekonomi:

1. Produk Domestik Bruto (PDB)
Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu perhitungan yang dilakukan dengan cara menghitung hasil produksi perekonomian tanpa memandang siapa pemilik faktor produksi. Seluruh faktor produksi yang berada di lingkungan perekonomian tersebut outputnya masuk dalam hitungan PDB. Hal ini berakibat, PDB kurang efektif dalam memberikan deskripsi tentang banyaknya output yang dihasilkan oleh faktor – faktor produksi milik perusahaan domestic.⁴⁵

⁴⁴ DAMRI BATUBARA, *OBJEK WISATA MULTI PLIER EFFECT* (Penerbit CV. SARNU UNTUNG, n.d.), 51.

⁴⁵ Prathama Rahardja, "Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi Dan Makroekonomi," 2008, 235.

Rumus PDB berdasarkan metode pengeluaran:⁴⁶

$$PDB = C + G + I + (X-M)$$

Keterangan:

C = konsumsi rumah tangga

G = konsumsi pemerintah/pengeluaran pemerintah

I = investasi/Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)

X = ekspor

M = impor

Rumus PDB berdasarkan metode penghasilan:

$$PDB = \text{Upah} + \text{Gaji} + \text{Sewa} + \text{Bunga} + \text{Keuntungan}$$

Berdasarkan rumus PDB harga konstan dan berlaku yang dikutip melalui buku makroekonomi milik Gregory Mankiw yang telah ditulis ulang oleh Dias Satria seperti berikut:⁴⁷

$$PDB \text{ harga konstan} = (\text{Harga barang A} \times \text{Jumlah barang A}) + (\text{Harga barang B} \times \text{Jumlah barang B})$$

$$PDB \text{ harga konstan} = (\text{Harga tahun dasar barang A} \times \text{Jumlah barang A}) + (\text{Harga tahun dasar barang B} \times \text{Jumlah barang B})$$

$$\text{Deflator PDB} = \frac{PDB \text{ Nominal}}{PDB \text{ Riil}}$$

$$PDB \text{ Nominal} = PDB \text{ Riil} \times \text{Deflator PDB}$$

$$PDB \text{ Riil} = \frac{PDB \text{ Nominal}}{\text{Deflator PDB}}$$

Perhitungan PDB menggunakan harga berlaku kurang efektif karena adanya pengaruh inflasi. Agar memperoleh hasil yang akurat perhitungan PDB menggunakan perhitungan berdasarkan harga konstan. Hasil menggunakan perhitungan harga konstan yaitu harga yang dianggap tidak berubah. Untuk mendapatkan PDB harga konstan perlu

⁴⁶ Thomas Ola Langoday, *Filosofi Dasar Ekonomi Makro: Berpikir Besar Dan Bertindak Besar Di Era Digital* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 35.

⁴⁷ Dias Satria, *Ekonomi, Uang, Dan Bank: Catatan Teoritis Dan Praktis* (Universitas Brawijaya Press, 2009), 6.

menentukan tahun dasar yang dimana ditentukan pada tahun dengan kondisi perekonomian stabil/konstan.⁴⁸

Rumus pertumbuhan ekonomi:⁴⁹

$$\text{Pertumbuhan ekonomi (\%)} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

PDB_t = PDB saat ini

PDB_{t-1} = PDB periode sebelumnya

2. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kegiatan perekonomian di semua wilayah maupun daerah pada periode tertentu. PDRB terdiri dari PDRB nominal dan PDRB riil. PDRB riil dihitung berdasarkan harga berlaku. Harga berlaku merupakan perhitungan menggunakan nilai suatu barang dan jasa menggunakan harga berlaku pada tahun yang ditentukan, sedangkan harga konstan merupakan perhitungan barang dan jasa menggunakan harga pada tahun yang telah ditentukan menjadi tahun acuan. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun menggunakan PDRB riil (tidak dipengaruhi oleh faktor harga). Sedangkan PDRB nominal digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi wilayah, perubahan, dan struktur ekonomi suatu wilayah.⁵⁰

Adapun rumus menghitung PDRB deflator sebagai berikut:

$$PDRB \text{ deflator} = \frac{PDRB \text{ nominal}}{PDRB \text{ riil}} \times 100$$

Terdapat tiga pendekatan untuk menghitung PDRB, yaitu sebagai berikut:⁵¹

1) Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi yaitu pendekatan nilai tambah yang diperoleh dari mengurangkan nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi biaya masing – masing nilai produksi bruto setiap sektor ekonomi. Berikut rumus pendekatan produksi:

Pendekatan produksi = nilai barang jadi – nilai bahan mentah

2) Pendekatan pendapatan

⁴⁸ Rahardja, "Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi Dan Makroekonomi," 240.

⁴⁹ Abi Pratiwa Siregar, *Metode Dan Aplikasi Perhitungan: Pemanfaatan Data Sekunder Di Bidang Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* (UGM PRESS, 2022), 148.

⁵⁰ R Widodo Dwi Pramono and Ratna Eka Suminar, *Ekonomi Wilayah Untuk Perencanaan Tata Ruang* (Deepublish, 2019), 42.

⁵¹ Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Grasindo, 2005), 90–91.

Pendekatan pendapatan yaitu nilai tambah dari kegiatan ekonomi dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi berupa upah, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung neto. Berikut rumus pendekatan pendapatan:

$$Y = w+r+i+p$$

Keterangan:

Y = pendapatan

w = *wage* (upah)

r = *rent* (sewa)

i = *interest rate* (suku bunga)

p = *profit* (keuntungan)

3) Pendekatan pengeluaran

Penggunaan perhitungan pendekatan pengeluaran yaitu untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan atau dikeluarkan oleh berbagai golongan masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, pemerintahan dan yayasan sosial, pembentukan modal dan ekspor, serta nilai barang dan jasa yang hanya berasal dari produksi domestik. Total pengeluaran dikurangi dengan nilai impor.

$$PDRB = C + I + G + (x-m)$$

Keterangan:

C = pengeluaran konsumsi rumah tangga

I = pembentukan modal

G = pengeluaran pemerintah

(x-m) = selisih nilai ekspor dan impor

3. Pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita adalah banyaknya pendapatan rata – rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk pada periode tertentu. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari periode tertentu. Pendapatan per kapita yang meningkat menandakan

bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Hal ini ditandai bahwa keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya.⁵²

Bank dunia menggunakan klasifikasi untuk melihat peringkat pembangunan antar negara. Berikut pembagiannya:⁵³

1) Low – Income Countries (LIC)

Negara yang masuk dalam kategori Low – Income Countries (LIC) yaitu negara yang memiliki pendapatan kurang atau sama dengan US\$ 765.

2) Middle – Income Countries (MIC)

Middle – Income Countries terbagi atas Lower Middle Income (LMC) dan Upper Middle Income (UMC). Negara yang masuk dalam kategori LMC yaitu negara yang memiliki pendapatan per kapita antara US\$ 766 hingga US\$ 3.053. Sedangkan, negara yang masuk dalam kategori UMC yaitu negara yang memiliki pendapatan per kapita diantara US\$ 3.036 hingga US\$ 9.385.

3) High – Income Countries (HIC)

Negara yang masuk dalam kategori High Income Countries (HIC) yaitu negara yang memiliki pendapatan per kapita lebih dari US\$ 9.386.

Adapun rumus untuk menghitung pendapatan per kapita suatu negara:

$$\text{Pendapatan Per kapita} = \frac{\text{Pendapatan Nasional}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

2.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Islam

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam berfokus pada keadilan distribusi. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam dapat perhatian dari ekonom dan cendikiawan fiqih yang kegiatannya mencakup aspek produksi dan berkaitan dengan keadilan distribusi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Islam menjadi sorotan dalam dalam teori ekonomi Islam klasik dalam Q.S Hud ayat 61 yang berbunyi:⁵⁴

⁵² Stefandy Dengah, Vecky Rumat, and Audie Niode, "Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun 2003-2012," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 14, no. 3 (2014): 75.

⁵³ Lestari Sukarniati, Firsty Ramadhona Amalia Lubis, and Nurul Azizah Az Zakiyyah, *Ekonomi Pembangunan (Teori Dan Tantangan Di Negara Berkembang)* (UAD PRESS, 2021), 73.

⁵⁴ Tri Anggoro Seto and M M SE, *Ekonomi Negara Berkembang Anggota ASEAN Dalam Perspektif Islam* (El-Markazi, 2022), 95.

❖ وَاللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامِ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾ وَآلِ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي

*Artinya: Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya)."*⁵⁵

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah adalah pembiayaan administrasi pemerintah untuk membiayai setiap kegiatan pembangunan. Pembiayaan pemerintah yang dikeluarkan berupa gaji pegawai pemerintah, pembiayaan sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, pembiayaan belanja senjata untuk negara, pembiayaan pembangunan infrastruktur. Belanja pemerintah berupa pembangunan sektor publik dapat meningkatkan pengeluaran agregat dan meningkatkan kegiatan ekonomi negara⁵⁶.

Menurut Mangkoesobroto dalam Siska Yuli Anita, dkk pengeluaran pemerintah merupakan suatu kebijakan yang di keluarkan pemerintah untuk pengadaan dan pembelian barang dan jasa. Sedangkan menurut Sadono Sukirno dalam Siska Yuli Anita, dkk pengeluaran pemerintahan adalah pembelanjaan dan konsumsi pemerintah untuk pembelian barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah dan pembangunan fasilitas.⁵⁷

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang telah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun di berbagai sektor maupun bidang dengan tujuan mensejahterakan rakyat melalui berbagai program. Dalam APBN pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu:⁵⁸

a. Pengeluaran Rutin

⁵⁵ Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag," Q.S Hud ayat 61, accessed March 23, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁵⁶ S E Faradilla Herlin, S E Ratih Rosita, and Hasan Basri M E, *Keuangan Daerah* (CV. AZKA PUSTAKA, 2021), 45.

⁵⁷ Siska Yuli Anita et al., *Pengantar Ekonomi: Mikro Dan Makro* (Sada Kurnia Pustaka, 2022), 190.

⁵⁸ Anwar Sadat, *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan* (Deepublish, 2022), 58.

Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah setiap tahun digunakan untuk pengadaan dan pemeliharaan operasi pemerintahan yang terdiri dari belanja pegawai yang berupa pemberian gaji pokok dan tunjangan, belanja perlengkapan harian, subsidi, pembayaran cicilan dan bunga atas hutang negara, belanja pemeliharaan agar konsisten terpelihara dan belanja perjalanan yaitu pengeluaran untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah.

b. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik untuk penambahan modal masyarakat. Pembangunan fasilitas umum yang dibangun pemerintah berupa pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik yang dilakukan pemerintah berupa program pengentasan kemiskinan. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu regulasi untuk membeli barang maupun jasa, pengeluaran pemerintah berarti dana yang dikeluarkan untuk merealisasikan regulasi tersebut.

2.1.3.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori pengeluaran pemerintah dibagi menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

a. Teori makro

Pengeluaran pemerintah riil dapat digunakan sebagai indikator besarnya rangkaian pemerintahan yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin sering rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maka semakin besar pengeluaran yang dikeluarkan untuk membiayai kelangsungan kegiatan pemerintahan tersebut. Menurut Boediono dalam Sadat, teori makro dalam pengeluaran pemerintah memiliki 3 bagian utama yang dapat dikelompokkan, yaitu:

- a) Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membeli barang dan jasa.
- b) Pengeluaran pemerintah digunakan untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai memiliki pengaruh terhadap makro ekonomi, perubahan yang terjadi dapat memberi pengaruh tingkat permintaan secara tidak langsung.
- c) Pengeluaran pemerintah digunakan untuk transfer payment. Transfer payment yang dimaksudkan yaitu pemberian langsung kepada warganya berupa pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai

golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat.⁵⁹

b. Teori mikro

Teori mikro bertujuan untuk analisis faktor penyebab permintaan barang umum dan faktor yang memiliki pengaruh terhadap kesediaan barang umum. Relevansi permintaan dan penawaran barang publik menjadi penentu jumlah barang publik yang akan disediakan menggunakan anggaran belanja. Jumlah barang publik yang disediakan selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.⁶⁰

2.1.3.2 Macam – Macam Pengeluaran Negara

Macam – macam pengeluaran negara menurut organisasi digolongkan menjadi 3 yaitu:⁶¹

a) Pemerintah Pusat

Pada pemerintah pusat, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni dana yang diperuntukkan dalam hal kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah pusat menggunakan APBN dibedakan menjadi 2 yaitu pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja diantaranya untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, bantuan sosial, dan hibah. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan yaitu pengeluaran obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri dan lainnya.

b) Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi menggunakan APBD hasil alokasi APBN dari pemerintah pusat dan pemungutan pajak dari masyarakat. Penggunaan dana APBN untuk belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja subsidi, belanja pinjaman, belanja bantuan sosial, belanja hibah, dan belanja lainnya. Sedangkan belanja modal yaitu belanja aset tetap, belanja aset lain – lain, dan belanja tak terduga.

c) Pemerintah Kabupaten/Kota

⁵⁹ Sadat, 59.

⁶⁰ Sadat, 63.

⁶¹ Sadat, 66–67.

Dalam pemerintah kabupaten/kota menggunakan dana APBD untuk pengeluaran belanja, bagi hasil pendapatan ke Desa/ Kelurahan, diantaranya bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan, bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan, pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom lainnya.

2.1.3.3 Pengeluaran Pemerintah Menurut Islam

Dalam Islam pengeluaran pemerintah diperoleh dari dana zakat, infaq, shadaqah, fai, kharaj, jizyah, ‘usyur, harta rampasan perang dan lainnya. Sedangkan di era modern menggunakan zakat, infaq, dan shadaqah melalui yang pembayarannya dapat dilakukan melalui *platform* digital sehingga memudahkan masyarakat dalam membayar maupun menyalurkan dana. Menurut Adiwarmanto Karim dalam Fudhail Rahman yaitu terdapat dua jenis penerimaan dalam Islam diantaranya penerimaan jenis regulasi, jenis sukarela dan jenis kondisional. Jenis penerimaan regulasi diantaranya. Zakat yang dialokasikan untuk kebutuhan dasar, kharaj dialokasikan untuk kesejahteraan sosial, jizyah dialokasikan untuk pendidikan dan penelitian, dan ‘usyur dialokasikan untuk infrastruktur (fasilitas publik). Sedangkan penerimaan jenis sukarela yaitu terdapat infaq, shadaqah, wakaf, hadiah – hibah dialokasikan untuk kepentingan dakwah Islam seperti administrasi negara, pertahanan dan keamanan. Lalu, penerimaan jenis kondisional terdapat khumus, pajak (nawaib), keuntungan BUMN, dan lainnya.⁶²

Berkaitan dengan kebijakan belanja umum pemerintah dalam ekonomi syariah dibagi menjadi tiga, diantaranya:⁶³

- a) Kebutuhan operasional pemerintah dengan pembelanjaan rutin.
- b) Belanja umum dilakukan oleh pemerintah apabila terdapat ketersediaan dana.
- c) Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat serta sistem pendanaannya.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

⁶² Muh Fudhail Rahman, “Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam,” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 2 (November 1, 2015): 249, <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2120>.

⁶³ Lilik Rahmawati, “Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam,” *OECOMICUS Journal of Economics* 1, no. 1 (2016): 44.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia yaitu parameter untuk menghitung rata – rata peningkatan yang ada di sektor utama dalam pembangunan manusia. Adapun faktor yang dapat meningkatkan pembangunan manusia diantaranya yaitu panjang umur dan sehat, berwawasan luas dan memiliki standar hidup layak. Pengukuran sektor kesehatan yaitu dengan menghitung angka harapan hidup saat lahir, sektor Pendidikan dihitung dengan rata – rata lama sekolah bagi orang dewasa berusia lebih dari 25 tahun, harapan lama sekolah untuk anak yang mulai bersekolah. Aspek standar hidup layak dihitung dengan pendapatan nasional bruto per kapita. Apabila terdapat negara memiliki tingkat GNI per kapita yang sama bukan berarti dapat mencapai hasil pembangunan manusia yang sama.⁶⁴

Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur target pembangunan manusia yang berdasarkan komponen dasar kualitas hidup. Ukuran kualitas hidup yang dibangun melalui kebijakan tiga aspek dasar. Aspek pertama yaitu digunakan untuk mengukur aspek Kesehatan dengan cara menggunakan angka harapan waktu lahir. Aspek kedua yaitu untuk mengukur aspek pengetahuan menggunakan gabungan indicator angka melek huruf dan rata – rata lama sekolah. Aspek ketiga yaitu untuk mengukur aspek hidup layak yang digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity*) terhadap kebutuhan pokok yang dihitung dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai salah satu komponen pendapatan untuk mencapai pembangunan untuk hidup layak.⁶⁵

Semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia 0 – 100 suatu daerah maupun negara maka semakin baik pembangunan yang ada di tempat tersebut. Menurut Erwin, dkk (2013) yang ditulis di buku *Investasi dalam Human Capital Kasus di Kota Manado* mengatakan bahwa indeks pembangunan manusia dikelompokkan menjadi tiga diantaranya:⁶⁶

1. Kelompok IPM kategori rendah dengan nilai indeksnya < 60
2. Kelompok IPM kategori sedang dengan nilai indeksnya 60 – 70
3. Kelompok IPM kategori tinggi dengan nilai indeksnya 70 – 80
4. Kelompok IPM kategori sangat tinggi dengan nilai indeksnya > 80.

⁶⁴ United National Development Program, “Indeks Pembangunan Manusia (HDI),” United National Development Program, accessed February 21, 2024, https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index?_gl=1*1rztrb9*_ga*MjA4MTU4NTkzNy4xNzA4NDg4NjA0*_ga_3W7LPK0WP1*MTcwODQ0DYwNC4xLjE uMTcwODQ0Dg5Ny41NS4wLjA.#/indicies/HDI.

⁶⁵ Badan Pusat Statistik, “Indeks Pembangunan Manusia,” Badan Pusat Statistik, accessed February 21, 2024, <https://tanjabtimkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>.

⁶⁶ Lady Grace Jane Giroth, Tiersa Reinie Undap, and Tinneke Evie Meggy Sumual, *Investasi Dalam Human Capital: Kasus Di Kota Manado* (CV. Bintang Semesta Media, 2023), 45.

IPM memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. IPM menjadi parameter untuk mengukur kesuksesan dalam usaha membangun kualitas hidup masyarakat.
2. IPM menjadi penentu tingkat pembangunan suatu negara/daerah.
3. IPM menjadi data fundamental karena tidak hanya sebagai parameter kinerja pemerintah, IPM juga menjadi salah satu bagian penentu Dana Alokasi Umum (DAU).⁶⁷

Terdapat perhitungan rumus yang dapat digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rumus yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{Indeks X_1 \times Indeks X_2 \times Indeks X_3}$$

Keterangan:

X₁ = Kesehatan

X₂ = Pengetahuan (Pendidikan)

X₃ = Daya beli

2.1.4.1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Penyempurnaan yang dilakukan UNDP untuk menghitung IPM yaitu dengan menggunakan indikator sebagai berikut:⁶⁸

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan berapa lama (tahun) masyarakat hidup baik dari lahir di dunia hingga tutup usia. Indikator AHH digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.

$$I \text{ kesehatan} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$$

2. Rata – rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

⁶⁷ Muhammad Rapii, Huzain Jailani, and Danang Prio Utomo, *Perekonomian Indonesia* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2022), 100.

⁶⁸ Badan Pusat Statistik, "Penyusunan IPM," Badan Pusat Statistik, accessed March 17, 2024, <https://brebeskab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab2>.

Rata – rata Lama Sekolah (RLS) adalah lamanya tahun belajar penduduk berusia diatas 15 tahun yang telah menyelesaikan Pendidikan formal (tidak termasuk tahun mengulang). Untuk menghitung RLS membutuhkan unsur seperti partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang telah/sedang ditempuh, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas yang telah/sedang ditempuh. Penduduk yang mencakup dalam hitungan RLS yaitu penduduk berusia diatas 25 tahun dengan asumsi pada usia 25 proses Pendidikan sudah berakhir.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dilakukan oleh anak pada umur yang telah ditentukan untuk jenjang Pendidikan tertentu di masa depan. Diasumsikan bahwa kesempatan anak tersebut akan bersekolah pada umur – umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Indikator RLS dan HLS digunakan sebagai parameter kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang Pendidikan.

$$I \text{ Pengetahuan} = \frac{I \text{ HLS} + I \text{ RLS}}{2}$$

$$I \text{ RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I \text{ HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

3. Daya Beli atau Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan

Pengeluaran per kapita untuk mengukur daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dapat diukur dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai parameter pendapatan yang dinilai mencapai pembangunan untuk hidup layak. Indikator daya beli digunakan sebagai parameter kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pengeluaran.

$$I \text{ pengeluaran} = \frac{In (\text{pengeluaran}) - In (\text{pengeluaran min})}{In (\text{pengeluaran maks}) - In (\text{pengeluaran min})}$$

Menurut perspektif Islam terdapat lima dimensi untuk membangun I – HDI. Dimensi ini diukur dari kinerja kesejahteraan material maupun kesejahteraan non

material. Terdapat lima kebutuhan dasar maqashid syariah pandangan Imam al – Syatibi, berikut formula kesejahteraan dalam Islam yang dirumuskan oleh Imam al – Syatibi yang dikutip oleh Anto M.H 2009 dan dikutip serta dituangkan di buku Islamic Human Development Index di Indonesia oleh Haqiqi Rafsanjani berisi:

WH : f (MW, NW)

MW : f (PO, DE)

NW : f (IEV)

IEV : f (LE, E, FSR, R)

Keterangan:

WH : Welfare Holistic (kesejahteraan holistic)

MW : Material Welfare (kesejahteraan materi)

NW : Non Material Welfare (kesejahteraan non materi)

PO : Property Ownership (kepemilikan harta atas individu)

DE : Distributional Equity (distribusi pendapatan)

IEV : Islamic Environment and Values (nilai – nilai Islam)

LE : Life Expectancy (kesehatan/harapan hidup)

E : Education (Pendidikan)

FSR : Family and Social Relationship (keluarga atau keturunan)

R : Religiosity (keagamaan)

Berdasarkan rumus di atas dapat diketahui bahwa kesejahteraan holistik (WH) dalam Islam berkaitan erat dengan kesejahteraan materi (MW) dan kesejahteraan non materi (NW). Kesejahteraan materi (MW) dapat dipengaruhi oleh kepemilikan harta atas individu (PO) dan distribusi pendapatan (DE). Kesejahteraan non materi (NW) dipengaruhi oleh nilai – nilai Islam (IEV). Nilai – nilai Islam (IEV) juga dipengaruhi oleh harapan hidup (LE), Pendidikan (E), keluarga atau keturunan (FSR) dan keagamaan (R).⁶⁹

2.1.4.2 Indeks Pembangunan Manusia Perspektif Islam

Dharuriyah merupakan kebutuhan pokok yang dipenuhi oleh setiap manusia berupa agama, jiwam akal, keturunan dan kehormatan, dan harta. Lalu terdapat *hajiyyah* yaitu pemeliharaan lima aspek di atas berkaitan dengan menghilangkan kesulitan.

⁶⁹ Haqiqi Rafsanjani, *Islamic Human Development Index in Indonesia* (UMSurabaya Publishing, 2022), 32.

Kemaslahatan *tahsiniyah* apabila tidak dipenuhi tidak mengakibatkan kehancuran hidup dan tidak akan membuahkan kesulitan dalam pemeliharaan lima aspek di atas.⁷⁰

1. Masalah *Dharuriyah*

Masalah dharuriyah adalah hal pokok yang ada dan dimiliki setiap manusia. Maqashid mengutamakan lima aspek (*ad – dien, an – nafs, an – nasl, al – aql, dan al maal*) yang harus dijaga oleh untuk kelangsungan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Apabila seseorang tidak beragama maka di sisi Allah swt. hidupnya tidak memiliki arti dan kebahagiaan akhirat yang Allah janjikan tidak di dapatkan. Ketika manusia tidak dapat memenuhi kemaslahatan jiwa, maka akan merasa tidak Sejahtera hidup di dunia. Oleh karena itu, manusia senantiasa menyupayakan memelihara jiwa dari gangguan agar kehadirannya di dunia bermanfaat. Beberapa cara untuk memelihara jiwa yaitu tidak melakukan aniaya terhadap sesama ciptaan Allah, tidak mudah menyerah terhadap nasib, berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Ketika manusia memiliki akal maka akan memudahkan mereka dalam menata hidup. Allah melarang sesuatu yang dapat merusak akal sehat manusia, pemeliharaan akal yang telah Allah perintahkan seperti larangan meminum khamr dan perintah mengasah otah dengan belajar. Apabila keturunan dan kehormatan dapat dijaga akan terciptanya keturunan yang memiliki nasab yang jelas dan sesuai dengan syara'. Berkaitan dengan harta terdapat kegiatan menjadi dapat dilaksanakan seperti menunaikan ibadah haji, umroh, sedekah dan lainnya.⁷¹

2. Masalah *Hajiyyah*

Maqashid hajiyyah memiliki tujuan syariat yang dibutuhkan untuk memudahkan kehidupan dan menghindari kesulitan, tapi tidak menjadi ancaman hidup. Menurut Al – Juwaini dalam Achmad Muzzamil Alfian Nasrullah di buku Maqashid Syariah (Konsep, Sejarah dan Metode), maqashid hajiyyah berkaitan dengan kebutuhan umum, tetapi tidak mencapai tingkat kebutuhan dharuriyyah. Aspek maqashid hajiyyah sebagai pendukung dari maqashid dharuriyyah. Apabila aspek hajiyyah tidak dipenuhi tidak menghancurkan hidup manusia, tetapi dapat mengurangi kenyamanan dan kesulitan.⁷²

⁷⁰ M Ag Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Prenada Media, 2020), 125.

⁷¹ M Ag Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Prenada Media, 2020), 126 –127.

⁷² Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Maqashid Syariah (Konsep, Sejarah Dan Metode)* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 47.

3. Maqashid *Tahsiniyyah*

Maqashid tahsiniyyah berfokus pada kebaikan, keindahan dan moralitas yang memberikan manfaat untuk masa kini maupun masa depan. Klasifikasi ini berkaitan dengan aspek estetika, moral, dan ibadah. Maqashid diperlukan untuk memastikan kehidupan manusia dapat berjalan dengan nyaman dan dilandasi oleh nilai – nilai etika dan moral.

IPM dalam perspektif Islam tujuan pembangunan yaitu untuk mencapai masalah. Masalah dalam diri manusia terdapat lima hal dasar yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Lima hal dasar menjadi elemen penting dalam IPM perspektif Islam diantaranya *index ad – dien* diwakili oleh aspek agama, *index an – nafs* diwakili oleh aspek umur Panjang dan sehat, *index al – aql* diwakili oleh aspek pengetahuan atau Pendidikan, *index an nasl* diwakili oleh aspek keluarga dan keturunan, dan *index al – maal* di wakili oleh aspek pendapatan atau daya beli. Kelima indeks yang telah disebutkan digunakan sebagai parameter maqashid syariah. Berikut penjelasan kelima indeks masalah dalam diri manusia

1. *Index ad – Dien*

Agama menjadi kebutuhan penting dan mendasar bagi umat Islam. Islam mengajarkan bahwa agama dijadikan sebagai pedoman hidup, aturan hidup bagi manusia serta membentuk moralitas dalam diri manusia. Agama dibutuhkan oleh manusia dalam situasi dan kondisi apapun serta dimanapun manusia berada. Adapun indikator yang menjadi parameter untuk mengukur *index ad – dien* yaitu terbagi menjadi aspek positif dan aspek negatif. Indikator dalam aspek positif yaitu jumlah masjid, puasa, zakat, haji, jumlah ulama, partisipasi sekolah, dan realisasi dana amal. Sedangkan indikator dalam aspek negatif yaitu terdapat angka kriminalitas dan *corruption perception*.⁷³ Berikut ayat yang membahas mengenai *index ad – dien*:

Q.S Al Baqarah ayat 43 tentang perintah shalat dan zakat, berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*⁷⁴

⁷³ Rafsanjani, *Islamic Human Devolepment Index in Indonesia*, 36.

⁷⁴ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” Al Baqarah ayat 43, accessed March 23, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Q.S Al – Baqarah ayat 183 tentang perintah puasa, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ⁷⁵

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*⁷⁵

Q.S Al – Hajj ayat 27 tentang perintah haji, berbunyi:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ⁷⁶

*Artinya: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.*⁷⁶

2. *Index an – Nafs*

Kesehatan yang diberkahi oleh Allah untuk dijaga oleh manusia dengan sebaik – baiknya sebagai bentuk rasa Syukur atas nikmat yang telah diberi Allah. Hal yang dapat membahayakan jasmani dan rohani sebaiknya dihindari agar tidak mengancam jiwa. Adapun indikator yang menjadi parameter untuk mengukur *index an – Nafs* yaitu terbagi menjadi aspek positif dan aspek negatif. Indikator dalam aspek positif yaitu angka harapan hidup, angka kesakitan (morbiditas), angka kunjungan ke fasilitas kesehatan, rasio sarana kesehatan, rasio tenaga kesehatan, imunisasi. Sedangkan indikator dalam aspek negatif yaitu drug prevalance (narkoba), smoking prevalance (perokok). Berikut ayat yang membahas mengenai *index an – nafs*:

Q.S al – Baqarah ayat 173 tentang makanan yang diharamkan

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ

عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ⁷⁷

*Artinya: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*⁷⁷

⁷⁵ Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag," Al Baqarah ayat 183, accessed March 23, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁷⁶ Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag," Al Hajj ayat 27, accessed March 23, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁷⁷ Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag," al – Baqarah ayat 173, accessed March 23, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Q.S al – Baqarah ayat 195 tentang larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*⁷⁸

3. Index al – ‘Aql

Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan manusia sebagai bekal hidup di dunia untuk dapat memahami ajaran agama dengan baik. Islam memberi perintah tegas kepada kaum muslim untuk menuntut ilmu agar tidak mengalami kesulitan dan penderitaan apabila hidup tanpa ilmu. Indikator dalam *index al – ‘aql* yaitu terdapat angka partisipasi sekolah, rata – rata lama sekolah, jumlah lembaga Pendidikan, tenaga pengajar, akses internet, angka melek huruf, angka buta huruf, jumlah hak paten, pengeluaran Pendidikan rumah tangga. Berikut ayat yang membahas mengenai *index al – ‘aql*:

Q.S al Mujadilah ayat 11 tentang derajat orang yang memiliki ilmu pengetahuan, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan didalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.*⁷⁹

Q.S Thoha ayat 114 tentang perintah memohon ditambahkan ilmu pengetahuan

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Artinya: Maka Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum

⁷⁸ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” al – Baqarah ayat 195, accessed March 23, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁷⁹ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” al Mujaadilah ayat 11, accessed March 23, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.”⁸⁰

4. *Index an – Nasl*

Kehidupan yang berkelanjutan manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya. Setiap manusia diperintahkan untuk menjaga keturunannya agar terhindar dari kerusakan menjaga eksistensi agar tetap berjalan dan melahirkan keturunan yang baik.⁸¹ Adapun indikator yang menjadi parameter untuk mengukur *index an – Nasl* yaitu terbagi menjadi aspek positif dan aspek negatif. Indikator dalam aspek positif yaitu angka reproduksi kasar, rata – rata jumlah kelahiran, angka kelahiran total, angka lahir hidup. Sedangkan untuk indikator dampak aspek negative yaitu tingkat perceraian, angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka kematian balita, dan angka kematian anak.⁸² Berikut ayat yang membahas mengenai *index an – nasl*:

Q.S adz – Dzariyat ayat 49 tentang Allah menciptakan berpasang – pasang

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*⁸³

Q.S al – Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina, berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*⁸⁴

5. *Index al – Maal*

Harta (maal) salah satu yang dibutuhkan manusia baik di dunia maupun religiusitas. Manusia membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan dharuriyat (primer), hajjiyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier).⁸⁵ Beribadah juga membutuhkan harta diantaranya membayar zakat, infaq, shadaqah, haji, dan Pendidikan untuk mendapat ilmu. Apabila

⁸⁰ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” Taha ayat 114, accessed March 23, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁸¹ Achmad Beadie Busyroel Basyar, “PERLINDUNGAN NASAB DALAM TEORI MAQASHID SYARIAH,” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (May 11, 2020): 5–6, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>.

⁸² Rafsanjani, *Islamic Human Development Index in Indonesia*, 52.

⁸³ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” adz – Dzariyaat ayat 49, accessed March 23, 2024, m.

⁸⁴ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” al – Isra ayat 32, accessed March 23, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁸⁵ Alfian Toar, Jumiati B, and Abdul Wahid Mongkito, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Industri Tebu PT Jhonlin Batu Mandiri Menggunakan Pendekatan Maqashid Syari’ah,” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (December 1, 2021): 273, <https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1453>.

tidak memiliki harta maka kelangsungan hidup yang dijalani untuk beribadah menjadi sulit. Index al – maal dibagi menjadi tiga aspek diantaranya kepemilikan harta, pertumbuhan pendapatan dan distribusi pendapatan. Aspek kepemilikan harta yang menjadi parameternya yaitu pendapatan per kapita dan rata – rata pengeluaran per kapita. Aspek pertumbuhan pendapatan yang menjadi parameter yaitu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Aspek distribusi pendapatan yang menjadi parameter yaitu rasio gini, garis kemiskinan, indeks kemiskinan manusia, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.⁸⁶

Berikut ayat yang membahas mengenai index al – maal diantaranya:

a. Kepemilikan Harta

Adapun ayat al – Qur’an yang mengatur tentang kepemilikan harta berbunyi:

Q.S Hud ayat 61 tentang perintah Allah memakmurkan bumi

﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
 وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya: Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).”⁸⁷

Q.S al – Jumu’ah ayat 10 tentang perintah untuk mencari karunia Allah, berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.⁸⁸

b. Distribusi Pendapatan

Adapun ayat yang mengatur tentang distribusi pendapatan yang dimiliki oleh orang yang kelebihan harta untuk didistribusikan kepada orang yang kekurangan harta, karena Islam tidak menghendaki ketimpangan harta yang

⁸⁶ Rafsanjani, *Islamic Human Devolepment Index in Indonesia*, 59.

⁸⁷ Agama, “Qur’an Kemenag.”

⁸⁸ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” al – Jumu’ah ayat 10, accessed March 23, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

hanya milik orang kaya saja. Islam meyakini bahwa Allah menitipkan harta yang lebih kepada umatnya maka di dalam hartanya terdapat hak orang miskin. Berikut ayat yang mengatur tentang distribusi pendapatan:

Q.S at – Taubah ayat 103 tentang perintah untuk mengeluarkan zakat, berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁸⁹

Q.S al – Ma’arij ayat 24 – 25 tentang hak orang miskin terhadap harta orang kaya, berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Artinya: (24) dan orang – orang yang di dalam hartanya ada bagian tertentu. (25) untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta.*⁹⁰

⁸⁹ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” at – Taubah ayat 103, accessed March 23, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁹⁰ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” al – Ma’arij ayat 24 – 25, accessed March 23, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

2..2 Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang dibahas memiliki beberapa variabel dan objek yang berbeda. Berikut contoh penelitian yang telah dilakukan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No .	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil penelitian
1	Junaidi dan Seroja Miranda “Pengaruh Usia Produktif, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur” (2022)	Menggunakan penelitian kuantitatif asosiatif karena untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih menggunakan data sekunder dan analisis regresi linear berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia Produktif (X_1) 2. Pertumbuhan ekonomi (X_2) 3. Indeks Pembangunan Manusia (X_3) 4. Kemiskinan (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia produktif berhubungan positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. 2. Pertumbuhan ekonomi berhubungan positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. 3. Indeks Pembangunan Manusia berhubungan positif dan signifikan

				terhadap jumlah penduduk miskin.
2	Meiran Panggabean dan Eka Ria Lestari “Pengaruh Pegeluaran Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 – 2017 “(2019)	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder dan menggunakan analisis regresi data panel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran Pemerintah Daerah (X_1) 2. Indeks Pembangunan Manusia (X_2) 3. Pertumbuhan Ekonomi (X_3) 4. Kemiskinan (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. 2. IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. 3. Pertumbuhan ekonomi berhubungan positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi

				Kalimantan Barat.
3	Bryan A. Futunanembun, Ita Pingkan F. Rorong, Hanly F. Dj. Siwu “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua Barat” (2023)	Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif asosiatif menggunakan data sekunder dan analisis regresi linear berganda	1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_1) 2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_2) 3. Kemiskinan (Y)	1. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. 2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berhubungan negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat.
4	Mochammad Dewa Pratama Putra dan Ririt Iriani Sri Setiawati “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah,	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif dan	1. Pengeluaran Pemerintah (X_1) 2. Jumlah Penduduk (X_2) 3. Pengangguran (X_3)	1. Pengeluaran pemerintah hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan

	Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Gresik” (2023)	menggunakan analisis regresi linear berganda	4. Kemiskinan (Y)	<p>di Kabupaten Gresik.</p> <p>2. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Gresik.</p> <p>3. Pengangguran memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Gresik.</p>
5	Siti Nur Aini dan Ris Yuwono Yudo Nugroho “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode regresi data panel	<p>1. Pertumbuhan Ekonomi (X_1)</p> <p>2. Pendidikan (X_2)</p> <p>3. Pengangguran (X_3)</p> <p>4. Ketimpangan Pendapatan (X_4)</p>	1. Pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

	Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur “ (2023)		5. Kemiskinan (Y)	<p>pada tahun 2013 – 2020.</p> <p>2. Pendidikan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 – 2020.</p> <p>3. Pengaruh pengangguran memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 – 2020.</p>
6	Novi Marsella, Abdul Rajab, dan Abdul Halim “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap	Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi	<p>1. Pertumbuhan Ekonomi (X₁)</p> <p>2. Kemiskinan (Y)</p>	1. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan

	Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Polewali Mandar” (2023)	linear sederhana		di Kabupaten Polewali Mandar.
7.	Darma Endarwati, Syamsu Nujum, dan Abbas Selong “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Indonesia 2017 – 2020 “ (2023)	Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi data panel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi (X_1) 2. Rasio Gini (X_2) 3. IPM (X_3) 4. Kemiskinan (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia 2017 – 2020 2. Rasio gini memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia 2017 – 2020 3. IPM memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia 2017 – 2020

8.	Rifka Amanda Fadillah, Dewi Rahmi dan Westi Riani “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kota Tasikmalaya Pada Tahun 2007 – 2020 “ (2022)	Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi (X_1) 2. Inflasi (X_2) 3. Pengeluaran Pemerintah (X_3) 4. Kemiskinan (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Tasikmalaya tahun 2007 – 2020. 2. Inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kota Tasikmalaya tahun 2007 – 2020 3. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Tasikmalaya
----	--	--	--	--

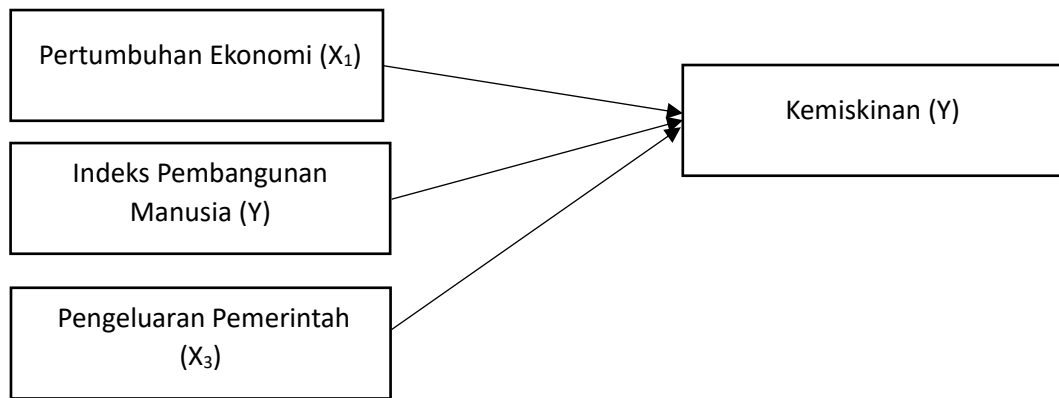
				tahun 2007 – 2020.
9.	Nia Mari'atus S., Teguh Hadi Priyono, dan Duwi Yunitasari “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Tahun D.I Yogyakarta 2013 – 2019 “ (2022)	Metode penelitian yang digunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis regresi data panel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi (X_1) 2. Inflasi (X_2) 3. Upah Minimum (X_3) 4. Pengeluaran Pemerintah (X_4) 5. Kemiskinan (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif terhadap kemiskinan. 2. Inflasi berhubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Yogyakarta tahun 2013 – 2019 . 3. Upah minimum memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Yogyakarta tahun 2013 – 2019. 4. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh

				terhadap kemiskinan di Provinsi Yogyakarta tahun 2013 – 2019.
10.	Lisa Agustin dan Hadi Sumarsono (2022) Pengaruh Pengangguran, IPM, dan Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur	Metode penelitian yang digunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis regresi data panel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangguran (X_1) 2. IPM (X_2) 3. Bantuan Sosial (X_3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangguran hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. 2. IPM berhubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. 3. Bantuan sosial berhubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan

				di Provinsi Jawa Timur.
11.	Muntina Juliana Evita dan Wiwin Priana Primandhana (2022) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Blora	Metode penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS)	1. Pertumbuhan Ekonomi (X_1) 2. IPM (X_2) 3. Belanja Pemerintah (X_3) 4. Kemiskinan (Y)	1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Blora tahun 2009 – 2020. 2. IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Blora tahun 2009 – 2020. 3. Belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Blora tahun 2009 – 2020.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini secara teoritis dikembangkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas diketahui bahwa penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu X_1 = Pertumbuhan Ekonomi, X_2 = Indeks Pembangunan Manusia, X_3 = Pengeluaran Pemerintah dan satu variabel dependent yaitu Y = Kemiskinan.

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang memiliki peluang benar atau salah dalam penelitian kuantitatif. Hipotesis berlandaskan teori maupun hasil penelitian sebelumnya untuk menguatkan pernyataan yang menjadi dugaan sementara. Hipotesis dapat ditolak apabila sesuai dengan data empiris dan diterima apabila sesuai dengan data empiris. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis perlu diuji menggunakan data – data empiris.⁹¹

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X_1) terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator kesuksesan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah akan menurunkan kemiskinan suatu wilayah.⁹² Menurut Todaro dalam Zainul Bahri dan Vinni Aprilianti pertumbuhan ekonomi ditandai dengan investasi – investasi yang dapat

⁹¹ Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah* (Penerbit Insania, 2021), 72.

⁹² Tenreng and Idris, "Ekonomi Makro," 296.

memperbaiki kualitas modal maupun sumber daya manusia dan fisik, yang dapat meningkatkan kuantitas sumber daya produktif, serta meningkatkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan – penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi.⁹³ Teori kemiskinan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yaitu Paradigma Neo Liberal. Paradigma liberal mengacu pada kebebasan individu dan kemiskinan berasal dari dalam diri masyarakat karena rasa malas, penurunan motivasi dan produktivitas masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Salsabil dan Westi Riani (2023) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2016 - 2020. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Q'rene V. F. Supit, Josep B. Kalangi, dan Steeva Y. L. Tumangkeng (2023) menyatakan bahwa Peertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa. Hal ini berarti jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka kemiskinan menurun.

Ha₁ : Pertumbuhan Ekonomi (X₁) berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan (Y)

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X₂) terhadap Kemiskinan (Y)

Menurut Beik Syauqi Irfan, IPM yaitu, indeks pembangunan yang diukur dengan indikator kesehatan, pendidikan dan daya beli. Indikator kesehatan dalam IPM dapat diukur dengan angka harapan hidup, indikator pendidikan dapat idukur dengan angka harapan sekolah dan rata – rata lama sekolah serta indikator daya beli dapat diukur dengan pendapatan per kapita. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat di lihat dari ketiga indikator IPM.⁹⁴ Teori kemiskinan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yaitu Paradigma Neo Liberal. Paradigma liberal mengacu pada kebebasan individu dan kemiskinan berasal dari dalam diri masyarakat karena rasa malas, penurunan motivasi dan produktivitas masyarakat.

⁹³ Zainul Bahri, Aprilianti, and SSTP, *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, Dan Blue Economy*, 8.

⁹⁴ I S Beik and L D Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi* (Rajagrafindo Persada, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=6r-qtAEACAAJ>.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lailan Syafrina Hasibuan (2023) menyatakan bahwa IPM berhubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinynda Rahmawati dan Dr. Asnita Frida Sebayang (2023) menyatakan bahwa IPM berhubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan ekstrem di 34 provinsi Indonesia.

Ha₂ : IPM berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan (Y)

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X₃) terhadap Kemiskinan (Y)

Pembiayaan pemerintah yang dikeluarkan berupa gaji pegawai pemerintah, pembiayaan sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, pembiayaan belanja senjata untuk negara, pembiayaan pembangunan infrastruktur. Belanja pemerintah berupa pembangunan sektor publik dapat meningkatkan pengeluaran agregat dan meningkatkan kegiatan ekonomi negara.⁹⁵ Menurut Anwar Sadat pengeluaran pemerintah yang menjadi pengeluaran pembangunan digunakan untuk pembangunan fisik yang dibangun pemerintah berupa pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik yang dilakukan pemerintah berupa program pengentasan kemiskinan.⁹⁶ Teori kemiskinan yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah yaitu paradigma demokrasi sosial mengacu pada ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat minim akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan. Pada paradigma demokrasi sosial tanpa adanya sumber keuangan yang cukup akan menghilangkan kebebasan karena keterbatasan dan menghilangkan kemampuan individu dalam menentukan pilihan.⁹⁷

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Indrianti Sulistia Ningsih dan Nawarti Bustaman (2022) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negative dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza Juanda dan Muhammad Kahpi Siregar (2022) menyatakan

⁹⁵ Faradilla Herlin, Ratih Rosita, and M E, *Kuangan Daerah*, 45.

⁹⁶ Sadat, *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*, 58.

⁹⁷ Suaib, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 169.

bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti jika pengeluaran pemerintah meningkat maka kemiskinan menurun karena penduduk telah mandiri secara ekonomi maupun keuangan.

H_{a3} : Pengeluaran Pemerintah (X_3) berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan (Y)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena semua datanya berupa angka. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel penelitian yang telah ditentukan dengan merancang hipotesis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan sampel jenuh. Penelitian kuantitatif yaitu konsep penelitian yang berfokus mengumpulkan dan menganalisis data numerik.⁹⁸

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan untuk penelitian bersumber dari website Badan Pusat Statistik (BPS) nasional maupun Provinsi. Website BPS Provinsi yang digunakan yaitu BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Provinsi DKI Jakarta, BPS Provinsi Banten, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Provinsi D.I Yogyakarta dan BPS Realisasi Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022. Website BPS yang digunakan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan penelitian. Data sekunder merupakan data yang disajikan oleh pihak kedua dengan cara mencatat, mempublikasi atau meminta data yang berbentuk informasi.⁹⁹

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah sejumlah subjek yang dapat diteliti dan memiliki kriteria tertentu. Populasi tidak hanya berupa angka yang terdapat di objek penelitian, tapi juga semua objek yang memenuhi kriteria sebagai objek penelitian. Bagian dari populasi merupakan subjek yang akan dihitung dan menjadi bagian yang diteliti. Populasi bukan hanya jumlah yang terdapat pada subjek maupun objek tapi juga termasuk seluruh kriteria yang dimiliki subjek atau objek.¹⁰⁰

Penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh kabupaten dan kota yang berada di provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota.

⁹⁸ Anastasia suci Sukmawati et al., *METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Teori Dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 1.

⁹⁹ Istijanto Oei, "Aplikasi Praktis Riset Pemasaran: Cara Praktis Meneliti Konsumen Dan Pesaing," 2009, 38.

¹⁰⁰ Nurwulan Purnasari, *Metodologi Penelitian* (Guepedia, 2021), 73.

Dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah dipublikasikan di website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini adalah populasinya:

No.	Kab/Kota
1	Kab. Banjarnegara
2	Kab. Banyumas
3	Kab. Batang
4	Kab. Blora
5	Kab. Boyolali
6	Kab. Brebes
7	Kab. Cilacap
8	Kab. Demak
9	Kab. Grobogan
10	Kab. Jepara
11	Kab. Karanganyar
12	Kab. Kebumen
13	Kab. Kendal
14	Kab. Klaten
15	Kab. Kudus
16	Kab. Magelang
17	Kab. Pati
18	Kab. Pekalongan
19	Kab. Pemalang
20	Kab. Purbalingga
21	Kab. Purworejo
22	Kab. Rembang
23	Kab. Semarang
24	Kab. Sragen
25	Kab. Sukoharjo
26	Kab. Tegal
27	Kab. Temanggung
28	Kab. Wonogiri
29	Kab. Wonosobo
30	Kota Magelang
31	Kota Pekalongan
32	Kota Salatiga
33	Kota Semarang
34	Kota Surakarta
35	Kota Tegal

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/>

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian yang memiliki kriteria dari populasi tersebut. Apabila jumlah populasi terlalu besar hingga membutuhkan tenaga, dana dan waktu yang lebih

banyak maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut.¹⁰¹ Penelitian ini menggunakan sampel jenuh karena seluruh populasi sebagai sampel.

Penjelasan diatas menegaskan bahwa peneliti menggunakan sampel jenuh karena seluruh anggota populasi akan diteliti adalah seluruh kabupaten dan kota yang berada di provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini dapat melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diambil dan berasal dari berbagai sumber tertulis meliputi jurnal, website, buku, majalah dan lain sebagainya.¹⁰² Penelitian ini menggunakan sumber dari BPS Realisasi Belanja Daerah Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Adapun pendukung penelitian ini menggunakan sumber dari buku, jurnal maupun website yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.4. Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel penelitian adalah bagian dari komponen penting dalam penelitian yang menjadi objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Menurut Arikunto dalam Budi Gautama Siregar yaitu objek penelitian yang menjadi titik perhatian penelitian.¹⁰³ Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua variabel, yaitu:

1. Variabel Bebas (Independent) yaitu variabel yang dapat memberikan pengaruh maupun perubahan terhadap variabel dependen (variable terikat). Pengaruh yang diberikan oleh variabel independen dapat berupa pengaruh positif maupun negatif untuk variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel bebas terdapat tiga macam yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Miskin, dan Pengeluaran Pemerintah.

- a. Pertumbuhan Ekonomi

¹⁰¹ Ardat Ahmad and Indra Jaya, *Biostatistik: Statistik Dalam Penelitian Kesehatan* (Prenada Media, 2021), 32.

¹⁰² Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. AZKA PUSTAKA, 2023), 32.

¹⁰³ Budi Gautama Siregar and H Ali Hardana, *Metode Penelitian EKonomi Dan Bisnis* (Merdeka Kreasi Group, 2022), 84.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kondisi perekonomian suatu negara maupun daerah menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Data yang digunakan oleh penelitian ini yaitu data dari BPS Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen), 2017 – 2022.

b. IPM

IPM sebagai parameter mengukur indikator kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Penelitian ini menggunakan data dari BPS IPM Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022.

c. Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dananya berasal dari APBN. Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan data dari BPS Realisasi Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022.

2. Variabel Terikat (Dependent) yaitu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Data penelitian yang digunakan yaitu dari BPS Kemiskinan Jawa Tengah tahun 2017 – 2022 persen.

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistika yang gunanya untuk menata data mentah menjadi mudah ditafsirkan. Statistik deskriptif dapat dianalisis dengan menghitung nilai mean, standar deviasi, varian, nilai minimum, nilai maksimum, sum, dan range. Tujuan menggunakan statistik deskriptif dalam penelitian yaitu untuk merangkum data hasil pengukuran agar dapat disajikan dan diinterpretasikan dengan jelas.¹⁰⁴

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui nilai residual berdistribusi dengan normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu model yang memiliki hasil nilai

¹⁰⁴ Yayat Suharyat, *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN* (wawasan Ilmu, n.d.), 103.

residual yang berdistribusi normal. Cara yang digunakan untuk mengetahui data berdistribusi dengan normal yaitu dengan melakukan uji Jarque – Bera. Uji Jarque – Bera berdasarkan pada sampel besar yang diduga memiliki bersifat *asymptotic*. Menurut Widarjono dalam Rifkhan, pengambilan Keputusan uji Jarque – Bera dilakukan apabila nilai chi square hitung < chi square tabel atau probabilitas Jarque – Bera > taraf signifikansi, maka residual memiliki distribusi normal. Sedangkan nilai chi squares hitung > chi square tabel atau probabilitas Jarque – Bera < taraf signifikansi, maka residual tidak memiliki distribusi normal.¹⁰⁵

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Penelitian ini menggunakan Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Berikut syarat untuk mengambil Keputusan menggunakan VIF, yaitu: ¹⁰⁶ Berikut syarat untuk mengambil keputusan menggunakan VIF, yaitu:

1. Jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.
2. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas pada model regresi.

3.5.3 Uji Regresi Data Panel

Regresi data panel adalah gabungan antara data time series dan data cross section. Data panel adalah data yang terdiri dari berbagai macam unit yang diamati selama periode tertentu. Adapun estimasi model regresi data panel sebagai berikut¹⁰⁷:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Keterangan:

Y : Kemiskinan

X₁ : Pertumbuhan Ekonomi

X₂ : IPM

X₃ : Pengeluaran Pemerintah

α : *Konstanta*

¹⁰⁵ Rifkhan, *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel Dan Kuesioner* (Indramayu, Jawa Barat: Cv Adanu Abimata, 2023), 81.

¹⁰⁶ M M Ir Sintha Wahjusaputri and Anim Purwanto, *Statistika Pendidikan: Teori Dan Aplikasi* (CV. Bintang Semesta Media, 2022), 125.

¹⁰⁷ Jim Hoy Yam, *Non-Performing Loan Dan Bank Sustainability Performance* (Deepublish, 2023), 90.

β_1 : Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi

β_2 : Koefisien regresi Kemiskinan

β_3 : Koefisien regresi Pengeluaran Pemerintah

i : 1,2,..., N, jumlah individu (cross section)

t : 1, 2, ..., T, periode

e : *error term*

1.5.3.1 Pendekatan Model Regresi Data Panel

Terdapat tiga model yang digunakan dalam model regresi data panel yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Berikut penjelasan dari masing – masing model:

1. *Common Effect Model (CEM)*

Common Effect Model (CEM) adalah pendekatan model data panel paling sederhana karena hanya penggabungan antara *time series* dengan *cross section*. Model ini tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu. Penggunaan model dapat melalui pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Adapun model statistic pada model CEM adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + e_{it}$$

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : variabel dependen

α : konstanta

β : koefisien regresi

β_1 : Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi

β_2 : Koefisien regresi IPM

β_3 : Koefisien regresi Pengeluaran Pemerintah

X : variabel independent

¹⁰⁸ Rifkhan, *Membaca Hasil Regresi Data Panel* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), 3–4.

X_1 : Pertumbuhan Ekonomi

X_2 : IPM

X_3 : Pengeluaran Pemerintah

i :intersep, cross section

t : time series

e : error

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Fixed Effect Model (FEM) adalah perbedaan antar individu dapat diakomodasikan dari perbedaan intersepnya. Perkiraan yang dilakukan dari data panel model *Fixed Effect* menggunakan teknik variabel *dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar objek, model perkiraan ini sering disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV). Adapun model statistic pada model CEM adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

3. *Random Effect Model (REM)*

Random Effect Model adalah model regresi data panel yang memiliki parameter lebih sedikit sehingga menimbulkan degrees of freedom lebih besar, namun pada FEM yang membedakan efek individual dan efek periode. Penggunaan REM dapat mempersingkat pemakaian derajat kebebasan sehingga estimasi menjadi lebih efisien. REM menggunakan *Generalized Least Square (GLS)* sebagai estimasi parameter. Adapun model statistic pada model REM adalah sebagai berikut:¹¹⁰

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

1.5.3.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dalam pemilihan model regresi data panel dilakukan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier untuk mendapatkan model terbaik. Adapun pemilihan model regresi data panel sebagai berikut:

1. Uji Chow

¹⁰⁹ Eviatiwi Kusumaningtyas et al., *Konsep Dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eview*, vol. 1 (Academia Publication, 2022), 20.

¹¹⁰ Erric Wijaya et al., *Buku Ajar Ekonometrika* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 110.

Uji Chow yaitu uji penentuan model terbaik diantara CEM atau FEM yang digunakan untuk estimasi data panel. Hipotesis untuk uji chow yaitu sebagai berikut:¹¹¹

H₀ : Model *Common Effect* dengan nilai probabilitas > 0,05

H₁ : Model *Fixed Effect* dengan nilai probabilitas < 0,05

2. Uji Hausman

Uji Hausman yaitu uji penentuan model terbaik diantara REM atau FEM yang digunakan untuk estimasi data panel. Hipotesis untuk uji hausman yaitu sebagai berikut:¹¹²

H₀ : Model *Random Effect* dengan nilai probabilitas > 0,05

H₁ : Model *Fixed Effect* dengan nilai probabilitas < 0,05

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier yaitu uji penentuan model terbaik diantara CEM atau REM yang digunakan untuk estimasi data panel. Hipotesis untuk uji Lagrange Multiplier yaitu sebagai berikut:¹¹³

H₀ : Model *Common Effect* dengan nilai probabilitas > 0,05

H₁ : Model *Random Effect* dengan nilai probabilitas < 0,05

4.4 Uji Hipotesis

4.4.4.1 Uji T atau Uji Parsial

Uji t merupakan uji yang digunakan untuk menguji variabel independen secara parsial maupun individu memiliki pengaruh atau tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Adapun rumus untuk menghitung Uji T (Parsial) sebagai berikut:

$$t_i = \frac{bj}{sbj}$$

Keterangan:

t_i : nilai t_{hitung}

bj : koefisien regresi

¹¹¹ Zulaika Matondang and Hamni Fadlilah Nasution, *Praktik Analisis Data: Pengolahan Ekonometrika Dengan Eviews Dan SPSS* (Merdeka Kreasi Group, 2022), 151.

¹¹² Mayasurru Lasiyama, *EKONOMI DAN BISNIS: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*, vol. 2 (Penerbit NEM, 2022), 72.

¹¹³ Amrie Firmansyah et al., *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?* (Penerbit Adab, 2021), 89.

sbj : kesalahan baku koefisien regresi

H₀ : Secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H₁ : Secara parsial variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Adapun syarat pengambilan keputusan menggunakan uji t, yaitu:¹¹⁴

1. Jika nilai probabilitas signifikan $t > 0.05$ maka H₀ diterima dan H₁ ditolak.
2. Jika nilai probabilitas signifikan $t < 0.05$ maka H₀ ditolak dan H₁ diterima.

3.5.4.2 Uji F atau Uji Simultan

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara bersama – sama mempengaruhi variabel dependent. Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan pengeluaran pemerintah secara bersama – sama memiliki pengaruh secara signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah. Adapun rumus untuk uji F sebagai berikut:¹¹⁵

$$F_{hitung} = \frac{r^2(k-1)}{(1-r^2)(n-k)}$$

Keterangan:

r² : koefisien korelasi

k : jumlah variabel independen

n : sampel

H₀ : Secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H₁ : Secara simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Adapun syarat pengambilan keputusan menggunakan uji F, yaitu:¹¹⁶

¹¹⁴ Elva Susanti et al., *Buku Ajar Statistika Untuk Perguruan Tinggi* (Penerbit Adab, 2021), 83.

¹¹⁵ Jihad Lukis Panjawa, Retno Sugiharti, and Penerbit Pustaka Rumah, *Pengantar Ekonometrika Dasar Teori Dan Aplikasi Praktis Untuk Sosial-Ekonomi* (Penerbit Pustaka Rumah C1nta, 2021), 28.

¹¹⁶ Nikous Soter Sihombing, *Lingkungan Bisnis Eksternal Dan Keunggulan Daya Saing Dalam Kinerja Pemasaran* (Penerbit Widina, 2022), 219.

1. Menggunakan nilai probabilitas signifikansi:
 - a. Jika nilai signifikansi atau P – Value > 0.05 maka H₀ diterima, dan H₁ ditolak.
 - b. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau P – Value < 0.05 maka H₀ ditolak, dan H₁ diterima.
2. Perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel}:
 - a. Jika F_{hitung} > F_{tabel} sehingga H₀ ditolak, dan H₁ diterima.
 - b. Jika F_{hitung} < F_{tabel} sehingga H₀ diterima, dan H₁ ditolak

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Analisis R² digunakan untuk mengetahui tingkat persentase pengaruh secara bersama – sama variabel independent terhadap variabel dependen. Analisis R² berfungsi sebagai alat ukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan varian variabel dependen yang ada. Nilai dari R² berada diantara 0 – 1 apabila nilai variabel R² mendekati 1 maka hubungan antar variabel semakin kuat. Koefisien determinasi (R²) menunjukkan banyaknya variasi variabel independent yang dapat dijelaskan oleh variabel dependen. Adapun rumus untuk menghitung nilai koefisien determinasi:¹¹⁷

$$R^2 = \frac{\text{jumlah Kuadrat Regresi}}{\text{jumlah Kuadrat Total}}$$

Adapun syarat untuk pengambilan keputusan, yaitu:

1. Jika nilai R² berada di antara 0 sampai 1, nilai R² semakin mendekati 1 menunjukkan pengaruh variabel dependen terhadap variabel independent semakin kuat.
2. Sebaliknya, semakin mendekati 0 maka menunjukkan pengaruh variabel dependen terhadap variabel independent semakin lemah.

¹¹⁷ Hadari Nawawi, “Analisis Regresi Dengan MS Excel 2007 Dan SPSS 17,” PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, 29.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2017 – 2022

Kemiskinan menjadi masalah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun daerah. Rata – rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 4.05% dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2017 – 2022 rata – rata sebesar 3.88%. Kemiskinan di Pulau Jawa termasuk di Jawa Tengah merupakan provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi kedua setelah provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2017 – 2022. Berikut tabel persentase kemiskinan di Pulau Jawa:

Tabel 4.1 Tabel Persentase Kemiskinan di Pulau Jawa

No.	Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata – rata
1.	Jawa Tengah	12,25	11,26	10,65	10,51	11,25	10,41	11,05
2.	Jawa Barat	7,86	7,30	6,89	7,79	8,69	8,35	7,81
3.	Jawa Timur	11,21	10,86	10,21	10,57	11,24	10,22	10,72
4.	D.I Yogyakarta	12,40	11,79	11,40	12,65	13,80	12,33	12,40
5.	D.K.I Jakarta	3,79	3,57	3,45	4,50	4,75	4,73	4,13
6.	Banten	5,62	5,34	5,04	6,24	7,28	6,77	6,05

Sumber BPS data diolah

Pada Tabel 4.1 persentase kemiskinan Provinsi 2017 – 2022 fluktuasi yang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 persentase kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 12,25% lalu menurun pada tahun 2018 menjadi 11,26% hal ini terjadi karena terdapat peningkatan investasi di Jawa Tengah sebesar 122,36%, pengangguran menurun 0,42%, angka stunting menurun 20,07% dan IPM meningkat 0,81%.¹¹⁸ Pada

¹¹⁸ Portal Resmi Jawa Tengah, “Pj Gubernur Jateng Raih ‘Most Inspiring Leader’ CNN Indonesia Award 2024,” jatengprov.go.id, 2018, <https://jatengprov.go.id/publik/pj-gubernur-jateng-raih-most-inspiring-leader-cnn-indonesia-award-2024/>.

tahun 2019 persentase kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 10,65% lalu menurun pada tahun 2020 menjadi 10,51%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan kemiskinan dari 10,51% menjadi 11.25%. Hal ini terjadi karena kondisi global yaitu covid – 19 yang berdampak pada perekonomian negara maupun daerah. Kemudian tahun 2022 kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dan memiliki persentase sebesar 10,41%. Hal ini terjadi karena pemulihan kondisi ekonomi global dampak dari covid – 19.

Tabel 4.2 Persentase Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Cilacap	1.39%	1.12%	1.07%	1.02%	1.03%	0.96%
Kabupaten Banyumas	1.70%	1.35%	1.25%	1.27%	1.30%	1.22%
Kabupaten Purbalingga	1.88%	1.56%	1.50%	1.50%	1.52%	1.43%
Kabupaten Banjarnegara	1.72%	1.54%	1.47%	1.42%	1.46%	1.36%
Kabupaten Kebumen	1.96%	1.75%	1.68%	1.56%	1.56%	1.42%
Kabupaten Purworejo	1.38%	1.17%	1.14%	1.10%	1.15%	1.06%
Kabupaten Wonosobo	2.03%	1.76%	1.66%	1.57%	1.58%	1.43%
Kabupaten Magelang	1.24%	1.12%	1.06%	1.13%	1.19%	1.11%
Kabupaten Boyolali	1.19%	1.00%	0.95%	0.95%	0.98%	0.90%
Kabupaten Klaten	1.41%	1.30%	1.23%	1.20%	1.25%	1.14%
Kabupaten Sukoharjo	0.87%	0.74%	0.71%	0.76%	0.81%	0.75%
Kabupaten Wonogiri	1.29%	1.07%	1.02%	1.00%	1.05%	1.00%
Kabupaten Karanganyar	1.23%	1.00%	0.95%	0.98%	1.02%	0.93%
Kabupaten Sragen	1.40%	1.31%	1.28%	1.22%	1.25%	1.16%
Kabupaten Grobogan	1.33%	1.23%	1.18%	1.19%	1.20%	1.11%
Kabupaten Blora	1.30%	1.19%	1.13%	1.17%	1.21%	1.12%
Kabupaten Rembang	1.83%	1.54%	1.49%	1.55%	1.57%	1.45%
Kabupaten Pati	1.14%	0.99%	0.94%	0.96%	0.97%	0.88%
Kabupaten Kudus	0.76%	0.70%	0.67%	0.76%	0.79%	0.77%
Kabupaten Jepara	0.81%	0.70%	0.66%	0.77%	0.80%	0.75%
Kabupaten Demak	1.34%	1.25%	1.18%	1.22%	1.25%	1.17%
Kabupaten Semarang	0.78%	0.73%	0.70%	0.76%	0.79%	0.74%
Kabupaten Temanggung	1.14%	0.98%	0.94%	0.98%	1.00%	0.91%
Kabupaten Kendal	1.11%	0.98%	0.94%	0.96%	0.98%	0.90%
Kabupaten Batang	1.08%	0.87%	0.83%	0.88%	0.93%	0.86%
Kabupaten Pekalongan	1.26%	1.00%	0.97%	0.95%	0.98%	0.89%
Kabupaten Pemalang	1.74%	1.60%	1.54%	1.42%	1.45%	1.30%
Kabupaten Tegal	0.99%	0.79%	0.76%	0.74%	0.77%	0.70%
Kabupaten Brebes	1.91%	1.72%	1.62%	1.56%	1.58%	1.45%
Kota Magelang	0.87%	0.79%	0.75%	0.76%	0.78%	0.71%
Kota Surakarta	1.06%	0.91%	0.87%	0.90%	0.93%	0.88%
Kota Salatiga	0.51%	0.48%	0.47%	0.50%	0.52%	0.48%
Kota Semarang	0.46%	0.41%	0.40%	0.48%	0.51%	0.48%
Kota Pekalongan	0.75%	0.67%	0.66%	0.72%	0.76%	0.70%
Kota Tegal	0.81%	0.78%	0.74%	0.71%	0.74%	0.71%

Sumber BPS data diolah

Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan luas wilayah sebesar 32.800,69 km² dengan jumlah penduduk 37.032.410 jiwa pada tahun 2022. Provinsi Jawa Tengah terdapat 29 kabupaten dan 6 kota. Kemiskinan tertinggi pada tahun 2017 terletak di Kabupaten Wonosobo dengan persentase sebesar 2,03%,. Pada tahun 2018 kemiskinan

tertinggi terletak di Kabupaten Wonosobo dengan persentase 1,76%. Lalu pada tahun 2019 kemiskinan tertinggi terletak di Kabupaten Kebumen dengan persentase sebesar 1,68%. Pada tahun 2020 dan 2021 kemiskinan tertinggi masih di tempati oleh Kabupaten Wonosobo dengan persentase sebesar 1,57% dan 1,58%. Terakhir pada tahun 2022 persentase kemiskinan tertinggi di tempati oleh Kabupaten Tegal dengan persentase 1,45%.

Sedangkan persentase kemiskinan terendah di tempati oleh Kota Semarang berturut – turut pada tahun 2017 – 2022. Pada tahun 2017 kemiskinan di Kota Semarang sebesar 0,46%, lalu pada tahun 2018 kemiskinan di Kota Semarang mengalami penurunan dengan persentase sebesar 0,41%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan persentase 0,40%. Tetapi pada tahun 2020 kemiskinan di Kota Semarang mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 0,48% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 0,51%. Hal ini disebabkan oleh adanya covid – 19 yang mengalami dampak buruk bagi kondisi ekonomi suatu negara maupun daerah salah satunya meningkatkan kemiskinan. Pada tahun 2022 kemiskinan di Kota Semarang mengalami penurunan dengan persentase sebesar 0,48%.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran seputar data penelitian. Statistic deskriptif yang berkaitan dengan variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	1.078571	3.888762	72.37329	7.22E+11
Median	1.025000	5.335000	71.30500	2.72E+09
Maximum	2.030000	6.980000	84.35000	4.87E+12
Minimum	0.400000	-10.28000	64.86000	8.83E+08
Std. Dev.	0.334968	2.890511	4.452513	1.11E+12
Skewness	0.342937	-1.689680	0.899755	1.215865
Kurtosis	2.640142	5.505378	3.316417	3.364777
Jarque-Bera	5.249307	154.8487	29.21064	52.90573
Probability	0.072465	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	226.5000	816.6400	15198.39	1.52E+14

Sum Sq. Dev.	23.45057	1746.206	4143.398	2.55E+26
Observations	210	210	210	210

Sumber: output Eviews 10 diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.3 uji statistik deskriptif di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Variabel kemiskinan memiliki nilai minimum sebesar 0,4% dan nilai maksimum sebesar 2,03%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah berada di antara 0,4% hingga 2,03%. Nilai mean sebesar 1,07% dan standar deviasi sebesar 0,33%. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi berarti semakin kecil simpangan data dalam penelitian.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum sebesar -10,28% dan nilai maksimum sebesar 6,98%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah berada di antara -10,28% hingga 6,98%. Nilai mean sebesar 3,88% dan standar deviasi sebesar 2,89%. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi berarti semakin kecil simpangan data dalam penelitian.
3. Variabel IPM memiliki nilai minimum sebesar 64.86 dan nilai maksimum sebesar 84,35. Hasil tersebut menunjukkan bahwa IPM di Provinsi Jawa Tengah berada di antara 64.86 hingga 84,35. Nilai mean sebesar 72,37 dan standar deviasi sebesar 4,45 berarti nilai mean lebih besar dari standar deviasi semakin kecil simpangan data dalam penelitian.
4. Variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai minimum 883.184.895 dan nilai maksimum sebesar 4.871.946.697.040 . Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Tengah berada di antara 883.184.895 hingga 4.871.946.697.040. Nilai mean sebesar 722.130.601.939,36 dan standar deviasi sebesar 1.105.367.934.301,55. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi berarti semakin kecil simpangan data dalam penelitian.

4.2.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel dapat menggunakan tiga pendekatan model yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pemilihan model memiliki perbedaan setiap model. Oleh karena itu, pemilihan model yang pertama dilakukan dengan menganalisis data panel dan pemilihan pendekatan tiga model. Berikut hasil olah data menggunakan tiga pendekatan model *Fixed Effect*, *Random Effect* dan *Common Effect*:

Tabel 4.4 Hasil Regresi Data Panel *Common Effect Model (CEM)*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.37306	1.208267	14.37850	0.0000
X ₁	0.007548	0.005924	1.274153	0.2040
LOG(X ₂)	-3.807740	0.283851	-13.41459	0.0000
LOG(X ₃)	-0.001120	0.005319	-0.210656	0.8334

Sumber: output Eviews 10 diolah, 2024

Tabel 4.5 Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model (FEM)*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45.25753	3.116186	14.52337	0.0000
X ₁	-0.003065	0.001842	-1.664176	0.0979
LOG(X ₂)	-10.40533	0.737944	-14.10043	0.0000
LOG(X ₃)	0.015459	0.002392	6.462683	0.0000

Sumber: output Eviews 10 diolah, 2024

Tabel 4.6 Hasil Regresi Data Panel *Random Effect Model (REM)*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.06424	2.116619	14.20390	0.0000
X ₁	0.000767	0.001751	0.438363	0.6616
LOG(X ₂)	-6.807170	0.501094	-13.58462	0.0000
LOG(X ₃)	0.006140	0.001937	3.170345	0.0018

Sumber: output Eviews 10 diolah, 2024

4.2.2.1 Uji Chow

Setelah dilakukan dan mendapatkan hasil dai pendekatan tiga model untuk melanjutkan Uji Cjow dengan melihat hasil antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Uji chow dilakukan untuk memilih model yang paling sesuai antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Berikut hasil Uji Chow yang telah dilakukan:

Tabel 4.7 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	df.	Prob.
Cross-section F	77.102747	(34,172)	0.0000
Cross-section Chi-square	585.386283	34	0.0000

Sumber: output Eviews 10 diolah, 2024

Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ H_0 diterima dan H_1 ditolak berarti penggunaan model yang tepat adalah *Common Effect Model*. Apabila probabilitas $< 0,05$ H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti penggunaan model yang tepat adalah *Fixed Effect Model*. Hasil Uji Chow yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* adalah 0,0000 artinya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hasil dari Uji Chow penelitian ini yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya model yang paling tepat digunakan yaitu *Fixed Effect Model*. Dengan demikian, *Fixed Effect model* sesuai dengan hasil Uji Chow dalam analisis data panel.

4.2.2.2 Uji Hausman

Setelah mengetahui hasil olah data pemilihan model dari Uji Chow dengan model yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model*. Maka dilakukan Uji Hausman dengan pemilihan model yang tepat antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Berikut hasil olah data Uji Hausman:

Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	45.855798	3	0.0000

Sumber: output Eviews 10 diolah, 2024

Apabila nilai probabilitas > 0.05 H_0 diterima dan H_1 ditolak berarti penggunaan model yang tepat adalah *Random Effect Model*. Apabila probabilitas $< 0,05$ H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti penggunaan model yang tepat adalah *Fixed Effect Model*. Hasil Uji Hausman yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross-section*

random adalah 0,0000 artinya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hasil dari Uji Hausman penelitian ini yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya model yang paling tepat digunakan yaitu *Fixed Effect Model*. Dengan demikian, *Fixed Effect Model* sesuai dengan hasil Uji Hausman dalam analisis data panel.

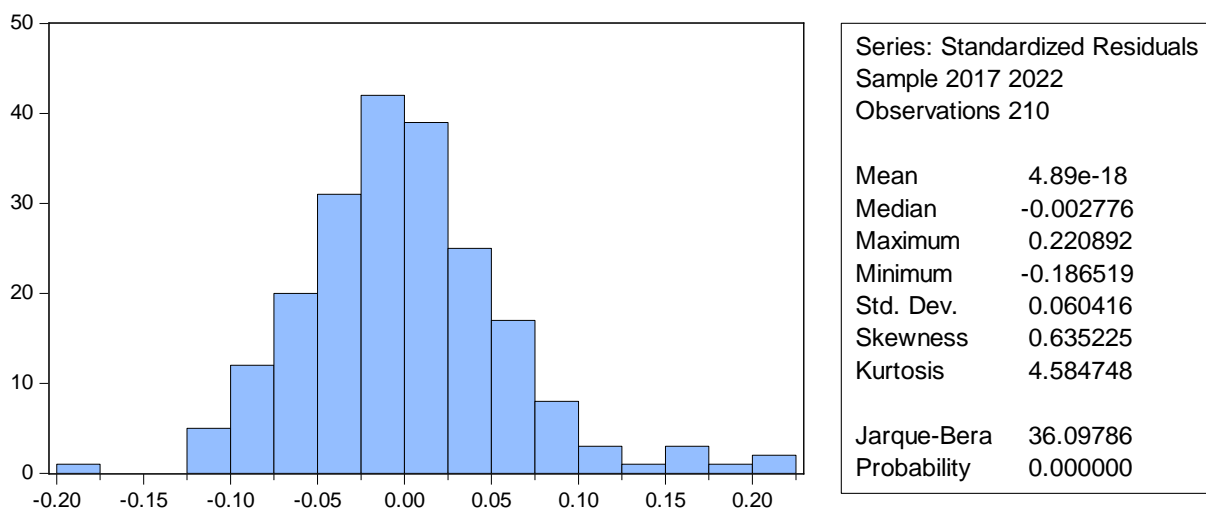
4.2.2.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk pemilihan model yang tepat antara *Common Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Pada hasil uji Chow dan uji Hausman yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemilihan model yang tepat yaitu *Fixed Effect Model*, maka uji Lagerange Multiplier (LM) tidak dilakukan.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas



Uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa probabilitas $0,000000 < 0,05$ berarti bahwa data tidak terdistribusi normal. Namun, terdapat penelitian dari Asghar Ghasemi dan Saleh Zahediasl menyatakan apabila sampel terdiri dari ratusan data atau sampel besar (lebih dari 30 atau 40) maka distribusi datanya cenderung normal tanpa memperhatikan bentuk datanya.¹¹⁹

¹¹⁹ Asghar Ghasemi and Saleh Zahediasl, "Normality Tests for Statistical Analysis: A Guide for Non-Statisticians," *International Journal of Endocrinology and Metabolism* 10, no. 2 (2012): 486.

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

	X ₁	LOG(X ₂)	LOG(X ₃)
X ₁	1.000000	0.009312	0.136056
X ₂	0.009312	1.000000	0.105531
X ₃	0.136056	0.105531	1.000000

Sumber: output Eviews 10 diolah, 2024

Uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel independen < 10.

4.2.4 Pengujian Hipotesis Regresi dengan Data Panel

4.2.4.1 Uji Regresi Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Tabel 4. 11 Hasil Olah Data Regresi Data Panel Variabel Dependen terhadap Variabel Independen

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45.25753	3.116186	14.52337	0.0000
X ₁	-0.003065	0.001842	-1.664176	0.0979
LOG(X ₂)	-10.40533	0.737944	-14.10043	0.0000
LOG(X ₃)	0.015459	0.002392	6.462683	0.0000

Sumber: output Eviews 10 diolah, 2024

Berdasarkan Hasil Uji *Fixed Effect Model*, maka hasil dari perhitungan Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan sebagai berikut:

$$Y = 45.2575297317 - 0.00306501863139 * X_1 - 10.4053342793 * \text{LOG}(X_2) + 0.0154591032815 * \text{LOG}(X_3) + [CX=F]$$

Interpretasi persamaan regresi di atas seperti di bawah ini:

1. Konstanta (α)

Nilai konstanta dalam persamaan regresi ini adalah sebesar 45,25752 yang menunjukkan nilai positif, artinya apabila variabel independen tidak terjadi

perubahan dan bernilai 0, maka persentase kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 45,2575%.

2. Pertumbuhan Ekonomi (X_1)

Koefisien regresi pada variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -0,00306 yang menunjukkan nilai negatif. Hal ini berarti setiap kenaikan 1% maka akan menurunkan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0,00306% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan.

3. IPM (X_2)

Koefisien regresi pada variabel IPM sebesar -10,40533 yang menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% maka akan menurunkan nilai persentase IPM sebesar -10,40533% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan.

4. Pengeluaran Pemerintah (X_3)

Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,015459 yang menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% maka akan menaikkan nilai persentase pengeluaran pemerintah sebesar 0,015459% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan.

5. Nilai Adjusted R – Squared

Nilai Adjusted R – Squared sebesar 0,960471 maka dapat diartikan bahwa pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen sebesar 0,039529.

4.2.4.2 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara parsial terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka hasil uji dianggap tidak signifikan atau H_0 diterima dan H_1 ditolak sebaliknya apabila probabilitas kurang dari 0,05 maka hasil uji dianggap signifikan atau H_0 ditolak dan H_1 diterima. Uji t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan dari variabel independent secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 12 Hasil Uji t

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45.25753	3.116186	14.52337	0.0000
X_1	-0.003065	0.001842	-1.664176	0.0979

LOG(X ₂)	-10.40533	0.737944	-14.10043	0.0000
LOG(X ₃)	0.015459	0.002392	6.462683	0.0000

Sumber: *output Eviews 10 diolah, 2024*

Berdasarkan Tabel 4.12 Di atas dapat dilihat bahwa dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk setiap variabel independent sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel Pertumbuhan Ekonomi diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,003065 dan probabilitas 0,0979 > α (0,05) maka H₀ diterima dan H₁ ditolak artinya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien regresi berarti variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Hasil uji hipotesis variabel IPM diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -10,40533 dan probabilitas 0,0000 < α (0,05) maka H₀ ditolak dan H₁ diterima artinya IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien regresi berarti variabel IPM berhubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Hasil uji hipotesis variabel Pengeluaran Pemerintah diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,015459 dan probabilitas 0,0000 < α (0,05) maka H₀ ditolak dan H₁ diterima artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien regresi berarti variabel pengeluaran pemerintah berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

4.2.4.3 Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi variabel independen bersama – sama mempengaruhi variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05, jika nilai signifikansi 0,05 lebih besar dari probabilitas maka berpengaruh signifikan sebaliknya apabila nilai signifikansi 0,05 lebih kecil dari probabilitas maka tidak berpengaruh signifikan. Berikut data hasil uji F:

Tabel 4.13 Tabel Hasil Uji F

F-statistic	138.2488
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: output Eviews 10 diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 138.2488 sementara F_{tabel} dengan tingkat $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 3.04. Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($138.2488 > 3.04$), kemudian dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0.000000 yang mana lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,00000 < 0,05$) maka memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan atau bersama – sama memiliki pengaruh signifikan terhadap persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

4.2.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) memiliki tujuan mengukur besaran kemampuan semua variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.967469
Adjusted R-squared	0.960471

Sumber: output Eviews 10 diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas nilai (R^2) = 0,967469 atau 96,67% berarti seluruh variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Pengeluaran Pemerintah) berpengaruh kuat terhadap variabel dependen (Kemiskinan) sebesar 96,67%. Sedangkan sisanya 3,33% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kondisi perekonomian negara ke arah lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pendapatan nasional yang mengalami peningkatan dan aspek ekonomi yang mengalami

peningkatan nilai. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi salah satu indikator kesuksesan suatu negara dalam meningkatkan aspek ekonomi. Perekonomian dapat menurunkan kemiskinan absolut apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) apabila dalam daerah. Pertumbuhan ekonomi meningkat ditandai dengan investasi dan kualitas sumber daya manusia yang produktif dengan mengikuti kemajuan teknologi. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena ketersediaan akses transportasi, teknologi, kesehatan dan pendidikan yang memadai.

Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 – 2022. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil pengujian hipotesis yang menghasilkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar $-0,003065$ dan probabilitas $0,0979 > \alpha (0.05)$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Pada nilai koefisien regresi berarti variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan berarti setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan persentase kemiskinan sebesar 0,003065%. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variable independen yang memiliki arah hubungan negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 – 2022. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Aini dan Ris Yuwono Yudo Nugroho yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.¹²⁰ Lalu terdapat penelitian dari Nia Mari'atus S., Teguh Hadi Priyono, dan Duwi Yunitasari yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif terhadap kemiskinan.¹²¹

¹²⁰ Siti Nur Aini, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur," *Buletin Ekonomika Pembangunan* 4, no. 1 (2023): 33.

¹²¹ Nia Mari'atus S, Teguh Hadi Priyono, and Duwi Yunitasari, "PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, UPAH MINIMUM, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013-2019," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 27, no. 2 (August 1, 2022): 269, <https://doi.org/10.35760/eb.2022.v27i2.4149>.

Penyebab pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan karena peningkatan pertumbuhan ekonomi di ikuti dengan penurunan angka kemiskinan di suatu wilayah. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya merata di semua wilayah yang ada di Jawa Tengah, masih terdapat wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah tetapi angka kemiskinan meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penurunan angka kemiskinan dapat ditandai di kota besar maupun wilayah yang potensial untuk meningkatkan investasi dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Todaro dalam Zainul Bahri dan Vinni Aprilianti pertumbuhan ekonomi ditandai dengan investasi – investasi yang dapat memperbaiki kualitas modal maupun sumber daya manusia dan fisik, yang dapat meningkatkan kuantitas sumber daya produktif, serta meningkatkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan – penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi.¹²²

Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui persentase peningkatan PDB yang ada di suatu wilayah sebagai capaian keberhasilan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi yang ada di wilayah potensial dapat meningkatkan penerimaan pendapatan nasional daerah. Kesimpulan yang dapat diambil pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Jawa Tengah memiliki pertumbuhan yang sama karena terdapat wilayah yang tertinggal dan tidak potensial dari segi sumber daya alam dan manusia sehingga menurunkan minat para investor untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam berfokus pada keadilan distribusi. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam dapat perhatian dari ekonom dan cendikiawan fiqih yang kegiatannya mencakup aspek produksi dan berkaitan dengan keadilan distribusi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Islam menjadi sorotan dalam dalam teori ekonomi Islam klasik dalam Q.S Hud ayat 61 yang berbunyi:¹²³

¹²² Zainul Bahri, Aprilianti, and SSTP, *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, Dan Blue Economy*, 8.

¹²³ Seto and SE, *Ekonomi Negara Berkembang Anggota ASEAN Dalam Perspektif Islam*, 95.

❖ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي

*Artinya: Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya)."*¹²⁴

Distribusi pendapatan dalam Islam adalah penyaluran harta dari pihak pemberi harta kepada pihak penerima harta yang memiliki hak untuk mendapatkan dan menerima harta untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Distribusi pendapatan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat karena sejalan dengan tujuan dasar Islam. Apabila kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi maka menurunkan angka terjadinya kesenjangan pendapatan di suatu daerah. Penurunan angka kesenjangan pendapatan dapat dilakukan dengan menerapkan salah satu prinsip Al – Quran yaitu menerapkan keadilan agar tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dengan miskin. Untuk merealisasikan pemerataan distribusi pendapatan dalam Islam dapat dilakukan dengan cara pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf di lembaga amil zakat.¹²⁵

Adapun ayat Al – Quran yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dalam Islam yaitu Q.S Al – Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu

¹²⁴ Agama, "Qur'an Kemenag."

¹²⁵ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2014), 140.

terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Dengan demikian penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan teori dan hipotesis penelitian. Terdapat arah hubungan yang berlawanan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dan memiliki arti apabila pertumbuhan ekonomi meningkat menurunkan angka kemiskinan.

4.3.2 Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien regresi sebesar -10.40533 dan probabilitas $0.0000 < \alpha (0.05)$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Pada nilai koefisien regresi berarti variabel IPM memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan berarti setiap kenaikan 1 satuan pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan persentase kemiskinan sebesar 10.40533. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan IPM merupakan variabel independen yang memiliki arah hubungan negatif berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 – 2022. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darma Endarwati, Syamsu Nujum, dan Abbas Selong dalam Jurnal Pendidikan Tambusai yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.¹²⁶ Lalu terdapat penelitian dari Lisa Agustin dan Sumarsono dalam Jurnal Ekonika yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.¹²⁷

Penyebab IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan adalah IPM menjadi parameter pembangunan manusia. Namun, capaian pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tidak merata. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator untuk mencapai peningkatan pembangunan yang

¹²⁶ Darma Endrawati, Syamsu Nujum, and Abbas Selong, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia 2017-2022," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 20149.

¹²⁷ Lisa Agustin and Hadi Sumarsono, "Pengaruh Pengangguran, IPM, Dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 7, no. 2 (2022): 281–82.

merata di antaranya meningkatkan angka harapan hidup untuk mengukur aspek kesehatan, rata – rata lama sekolah dan harapan lama sekolah untuk mengukur aspek pendidikan, dan daya beli masyarakat untuk mengukur aspek ekonomi. Apabila dari ketiga aspek yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi dapat ditingkatkan maka produktivitas dan kualitas hidup masyarakat menjadi meningkat. Peningkatan IPM di Provinsi Jawa Tengah terjadi karena kesadaran masyarakat mengenai pendidikan, kesehatan dan daya beli terutama di daerah yang memiliki akses infrastruktur yang memadai.

IPM di Jawa Tengah terjadi ketimpangan antara daerah perkotaan dengan kabupaten, hal ini terjadi karena daerah tersebut terdapat hambatan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan sumber daya alam yang dapat meningkatkan pendapatan nasional daerah. Apabila pendapatan per kapita di Jawa Tengah meningkat akan meningkatkan IPM dan menurunkan angka kemiskinan, hal ini terjadi karena masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup.¹²⁸

Terdapat tiga indikator dalam IPM yaitu angka harapan hidup untuk aspek kesehatan, rata – rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dalam aspek pendidikan dan standar hidup layak dalam aspek pendapatan. Berdasarkan data dari BPS, angka harapan hidup terendah pada tahun 2017 hingga 2022 ditempati oleh Kabupaten Brebes. Urutan angka harapan hidup dari tahun 2017 – 2022 yaitu 68,61 tahun, 68,84 tahun, 69,04 tahun, 69,33 tahun, 69,54 tahun, dan 69,74 tahun. Sedangkan angka harapan hidup tertinggi di tempati oleh Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017 – 2022. Urutan angka harapan hidup dari tahun 2017 – 2022 yaitu 77,49 tahun, 77,54 tahun, 77,55 tahun, 77,65 tahun, 77,73 tahun dan 77,82 tahun.¹²⁹

Berdasarkan data dari BPS, indikator rata – rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dalam aspek pendidikan di Jawa Tengah tahun 2017 – 2022 pada angka harapan lama sekolah terendah di tempati oleh Kabupaten

¹²⁸ Muhamad Ferdy Firmansyah et al., “Mengungkap Keterkaitan Aspek Sosial-Ekonomi Dengan Pembangunan Manusia (Studi Pada Enam Wilayah Pembangunan Jawa Barat),” *Jambura Economic Education Journal* 6, no. 2 (July 1, 2024): 330–49, <https://doi.org/10.37479/jeej.v6i2.24443>.

¹²⁹ Badan Pusat Statistik, “Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Jawa Tengah (Tahun),” Badan Pusat Statistik, n.d., <https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTYxIzI=/angka-harapan-hidup-ahh-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-jawa-tengah.html>.

Banjarnegara dan tertinggi di tempati oleh Kota Semarang. Urutan indikator angka harapan lama sekolah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 – 2022 yaitu 11,41 tahun, 11,42 tahun, 11,45 tahun, 11,46 tahun, 11,63 tahun, dan 11,81 tahun. Sedangkan angka harapan hidup tertinggi di tempati oleh Kota Semarang pada tahun 2017 – 2022 dengan urutan 15,2 tahun, 15,5 tahun, 15,51 tahun, 15,52 tahun, 15,53 tahun dan 15,54 tahun.¹³⁰ Indikator rata – rata lama sekolah terendah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022 di tempati oleh Kabupaten Brebes dan tertinggi di tempati oleh Kota Salatiga. Urutan indikator rata – rata lama sekolah di Kabupaten Brebes pada tahun 2017 – 2022 yaitu 6,18 tahun, 6,19 tahun, 6,2 tahun, 6,21 tahun, 6,22 tahun, dan 6,35 tahun. Sedangkan rata – rata lama sekolah tertinggi di tempati oleh Kota Salatiga dengan urutan 10,15 tahun, 10,4 tahun, 10,41 tahun, 10,42 tahun, 10,66 tahun, dan 10,95 tahun.¹³¹ Pada aspek pendidikan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi dan stabil yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Semarang. Hal ini juga terjadi karena IPM di daerah tersebut sangat tinggi di atas 75. Sedangkan IPM terendah di tempati oleh Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan data dari BPS, indikator pengeluaran pemerintah per kapita di sesuaikan terendah pada tahun 2017 – 2022 di tempati oleh Kabupaten Pemasang dengan urutan 7.79 juta pertahun, 8.18 juta per tahun, 8,54 juta per tahun, 8,46 juta per tahun, 8,6 juta per tahun, 8,9 juta per tahun. Sedangkan pengeluaran pemerintah per kapita di sesuaikan tertinggi pada tahun 2017 – 2022 di tempati oleh Kota Salatiga dengan urutan 14,9 juta per tahun, 15,4 juta per tahun, 15,9 juta per tahun, 15,6 juta per tahun, 15,8 juta per tahun, dan 16,3 juta per tahun. Pada aspek daya beli di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 – 2022 yang di sesuaikan dengan pengeluaran per kapita terendah yaitu di tempati oleh Kabupaten Pemasang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonogiri dengan

¹³⁰ Badan Pusat Statistik, “Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Tahun),” Badan Pusat Statistik, n.d., <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjMyNCMy/angka-harapan-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

¹³¹ Badan Pusat Statistik, “Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun),” Badan Pusat Statistik, n.d., <https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUxIzI=/rata-rata-lama-sekolah.html>.

pengeluaran per kapita masih dibawah 10 juta per tahun. Sedangkan Kabupaten Boyolali, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Salatiga termasuk dalam pengeluaran per kapita tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan pengeluaran per kapita di atas 14 juta per tahun.¹³²

IPM dalam perspektif Islam mengacu pada 5 indeks yaitu indeks *ad – dien*, *an – nafs*, *an – nasl*, *al – ‘aql*, dan *al – maal*. Pada indeks *ad – dien* yaitu agama menjadi kebutuhan penting dan mendasar bagi umat Islam. Islam mengajarkan bahwa agama dijadikan sebagai pedoman hidup, aturan hidup bagi manusia serta membentuk moralitas dalam diri manusia. Agama dibutuhkan oleh manusia dalam situasi dan kondisi apapun serta dimanapun manusia berada. Indeks *an – nafs* yaitu merujuk pada kesehatan yang diberkahi oleh Allah untuk dijaga oleh manusia dengan sebaik – baiknya sebagai bentuk rasa Syukur atas nikmat yang telah diberi Allah. Hal yang dapat membahayakan jasmani dan rohani sebaiknya dihindari agar tidak mengancam jiwa. Indikator dalam aspek positif pada indeks *an – nafs* yaitu angka harapan hidup, angka kesakitan (morbiditas), angka kunjungan ke fasilitas kesehatan, rasio sarana kesehatan, rasio tenaga kesehatan, imunisasi. Indeks *an – nasl* Kehidupan yang berkelanjutan manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya. Setiap manusia diperintahkan untuk menjaga keturunannya agar terhindar dari kerusakan menjaga eksistensi agar tetap berjalan dan melahirkan keturunan yang baik.¹³³ Indikator dalam aspek positif yaitu angka reproduksi kasar, rata – rata jumlah kelahiran, angka kelahiran total, angka lahir hidup. Sedangkan untuk indikator dampak aspek negative yaitu tingkat perceraian, angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka kematian balita, dan angka kematian anak.¹³⁴

Pada indeks *al – ‘aql* yaitu Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan manusia sebagai bekal hidup di dunia untuk dapat memahami ajaran agama dengan baik. Islam memberi perintah tegas kepada kaum muslim untuk menuntut ilmu agar tidak mengalami kesulitan dan penderitaan apabila hidup tanpa ilmu. Indikator

¹³² Badan Pusat Statistik, "Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)," Badan Pusat Statistik, n.d., <https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU0lzl=/pengeluaran-per-kapita-disesuaikan.html>.

¹³³ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "PERLINDUNGAN NASAB DALAM TEORI MAQASHID SYARIAH," 5–6.

¹³⁴ Rafsanjani, *Islamic Human Development Index in Indonesia*, 52.

dalam *index al – ‘aql* yaitu terdapat angka partisipasi sekolah, rata – rata lama sekolah, jumlah lembaga Pendidikan, tenaga pengajar, akses internet, angka melek huruf, angka buta huruf, jumlah hak paten, pengeluaran Pendidikan rumah tangga. Indeks *al – maal* Harta (maal) salah satu yang dibutuhkan manusia baik di dunia maupun religiusitas. Manusia membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan dharuriyat (primer), hajjiyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier).¹³⁵ Beribadah juga membutuhkan harta diantaranya membayar zakat, infaq, shadaqah, haji, dan Pendidikan untuk mendapat ilmu. Apabila tidak memiliki harta maka kelangsungan hidup yang dijalani untuk beribadah menjadi sulit. Index *al – maal* dibagi menjadi tiga aspek diantaranya kepemilikan harta, pertumbuhan pendapatan dan distribusi pendapatan. Aspek kepemilikan harta yang menjadi parameternya yaitu pendapatan per kapita dan rata – rata pengeluaran per kapita. Aspek pertumbuhan pendapatan yang menjadi parameter yaitu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Aspek distribusi pendapatan yang menjadi parameter yaitu rasio gini, garis kemiskinan, indeks kemiskinan manusia, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.¹³⁶

Q.S at – Taubah ayat 103 tentang perintah untuk mengeluarkan zakat, berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹³⁷

Dengan demikian penelitian yang berkaitan dengan pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan teori dan hipotesis penelitian. Terdapat arah hubungan yang berlawanan dengan tingkat IPM dengan kemiskinan dan memiliki arti apabila IPM meningkat menurunkan angka kemiskinan.

¹³⁵ Toar, B, and Wahid Mongkito, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Industri Tebu PT Jhonlin Batu Mandiri Menggunakan Pendekatan Maqashid Syari’ah,” 273.

¹³⁶ Rafsanjani, *Islamic Human Devolepment Index in Indonesia*, 59.

¹³⁷ Agama, “Qur’an Kemenag.”

4.3.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien regresi sebesar 0.015459 dan probabilitas $0.0000 < \alpha (0.05)$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Pada nilai koefisien regresi berarti variabel pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan berarti setiap kenaikan 1 satuan pengeluaran pemerintah maka akan menaikkan persentase kemiskinan sebesar 0.015459. Hal tersebut menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah meningkat maka di ikuti peningkatan kemiskinan dan sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Dewa Pratama Putra dan Ririt Iriani Sri Setiawati dalam Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro yang menjelaskan adanya pengaruh positif dan signifikan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan.¹³⁸ Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan variable independen yang memiliki arah hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 – 2022.

Secara teoretis pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Namun yang terjadi penyebab pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan adalah kenaikan signifikan pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dan 2022 di ikuti dengan kenaikan angka kemiskinan. Hal ini di sebabkan oleh pandemi covid – 19 yang menyebabkan pemerintah menambah anggaran untuk membantu pemulihan ekonomi daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Menurut Mangkoesoebroto dalam Siska Yuli Anita, dkk pengeluaran pemerintah merupakan suatu kebijakan yang di keluarkan pemerintah untuk pengadaan dan pembelian barang dan jasa. Sedangkan menurut Sadono Sukirno dalam Siska Yuli Anita, dkk pengeluaran pemerintahan adalah pembelanjaan

¹³⁸ Mochammad Dewa Pratama Putra and Ririt Iriani Sri Setiawati, "PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, JUMLAH PENDUDUK DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN GRESIK," *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 11, no. 1 (May 31, 2023), <https://doi.org/10.24127/pro.v11i1.7894>.

dan konsumsi pemerintah untuk pembelian barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah dan pembangunan fasilitas.¹³⁹

Dalam perspektif Islam berkaitan dengan kebijakan belanja umum pemerintah dalam ekonomi syariah dibagi menjadi tiga, diantaranya kebutuhan operasional pemerintah dengan pembelanjaan rutin, belanja umum dilakukan oleh pemerintah apabila terdapat ketersediaan dana, dan belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat serta sistem pendanaannya.¹⁴⁰ Adapun ayat Al – Qur’an yang menyiratkan dan berkaitan dengan pengeluaran pemerintah yaitu Q.S Al – Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dengan demikian penelitian yang berkaitan dengan pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan teori dan hipotesis penelitian. Terdapat arah hubungan yang searah dengan tingkat pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan dan memiliki arti apabila terdapat kenaikan pengeluaran pemerintah maka menaikkan angka kemiskinan.

¹³⁹ Anita et al., *Pengantar Ekonomi: Mikro Dan Makro*, 190.

¹⁴⁰ Rahmawati, “Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam,” 44.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan dengan menggunakan pengaruh tiga variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, IPM, dan pengeluaran pemerintah. Lalu terdapat satu variabel dependen yaitu kemiskinan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis menggunakan model terpilih yaitu Fixed Effect menggunakan uji t terdapat kesimpulan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022.
2. Berdasarkan analisis menggunakan model terpilih yaitu Fixed Effect menggunakan uji t terdapat kesimpulan bahwa secara parsial IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022.
3. Berdasarkan analisis menggunakan model terpilih yaitu Fixed Effect menggunakan uji t terdapat kesimpulan bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022.

5.2 Saran

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, IPM dan pengeluaran pemerintah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini sehingga perlu perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini di antaranya:

- a. Keterbatasan periode penelitian yang digunakan hanya 6 tahun yaitu pada tahun 2017 – 2022.
- b. Pemilihan dan pembahasan variabel yang digunakan belum dapat menjelaskan secara luas dan teoretis untuk pengentasan kemiskinan.

- c. Perincian variabel pengeluaran pemerintah dalam berbagai sektor agar menunjukkan pengaruh langsung terhadap kemiskinan dan hubungannya dengan variabel IPM dan pertumbuhan ekonomi. Saran untuk pemerintah agar penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan penerapan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Beadie Busyroel Basyar. "PERLINDUNGAN NASAB DALAM TEORI MAQASHID SYARIAH." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (May 11, 2020): 1–16. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>.
- Agama, Kementerian. "Q.S Nuh Ayat 10 - 12." Qur'an Kemenag. Accessed November 11, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . "Qur'an Kemenag." Q.S Ar Radd ayat 11. Accessed November 2, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . "Qur'an Kemenag." Q.S Hud ayat 61. Accessed March 23, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . "Qur'an Kemenag." Al Baqarah ayat 43. Accessed March 23, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . "Qur'an Kemenag." Al Baqarah ayat 183. Accessed March 23, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . "Qur'an Kemenag." Al Hajj ayat 27. Accessed March 23, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . "Qur'an Kemenag." al – Baqarah ayat 173. Accessed March 23, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . "Qur'an Kemenag." al – Baqarah ayat 195. Accessed March 23, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . "Qur'an Kemenag." al Mujaadilah ayat 11. Accessed March 23, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . "Qur'an Kemenag." Taha ayat 114. Accessed March 23, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . "Qur'an Kemenag." adz – Dzariyaat ayat 49. Accessed March 23, 2024. m. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . "Qur'an Kemenag." al – Isra ayat 32. Accessed March 23, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . "Qur'an Kemenag." al – Jumu'ah ayat 10. Accessed March 23, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.

<https://quran.kemenag.go.id/>.

———. “Qur’an Kemenag.” at – Taubah ayat 103. Accessed March 23, 2024.

<https://quran.kemenag.go.id/>.

———. “Qur’an Kemenag.” al – Ma’arij ayat 24 – 25. Accessed March 23, 2024.

<https://quran.kemenag.go.id/>.

Agustin, Lisa, and Hadi Sumarsono. “Pengaruh Pengangguran, IPM, Dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 7, no. 2 (2022): 263–86.

Ahmad, Ardat, and Indra Jaya. *Biostatistik: Statistik Dalam Penelitian Kesehatan*. Prenada Media, 2021.

Aini, Siti Nur. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur.” *Buletin Ekonomika Pembangunan* 4, no. 1 (2023).

Anita, Siska Yuli, Hari Wahyuni, Nurlaila Hanum, Trimardi Jaya Putra, Yuanita Levany, Miranti Pradipta Utami, Imam Arrywibowo Satrya Utama, Dedi Sufriadi, Yenni Agustina, and Iwan Prasetyo. *Pengantar Ekonomi: Mikro Dan Makro*. Sada Kurnia Pustaka, 2022.

Ashari, Masjudin. “Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013).” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (2016): 163–80.

Azmi, Reza Mu’tiqul, and Jihad Lukis Panjawa. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan.” *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2, no. 6 (2022): 127–40.

Bahasoan, Awal N. *FAKTOR–FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SULAWESI TENGAH*. Penerbit Qiara Media, 2022.

BATUBARA, DAMRI. *OBJEK WISATA MULTI PLIER EFFECT*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG, n.d.

Beik, I S, and L D Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Rajagrafindo

- Persada, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=6r-qtAEACAAJ>.
- Busyro, M Ag. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Prenada Media, 2020.
- Cantika, Sri Budi. “Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam.” *Journal of Innovation in Business and Economics* 4, no. 2 (2013): 101–14.
- Chapra, M Umer. *Islam and the Economic Challenge*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992.
- Dengah, Stefandy, Vecky Rumate, and Audie Niode. “Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun 2003-2012.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 14, no. 3 (2014).
- Endrawati, Darma, Syamsu Nujum, and Abbas Selong. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia 2017-2022.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023).
- Fadli, Zul, Ade Onny Siagian, Nurganda Siregar, Dona Amelia, Fandra Dikhi Januardani, Nanda Harry Mardika, Dedi Herdiansyah, Sriwanti Belani, and Muhammad Jamil. *Ekonomi Makro: Teori-Teori Pengantar*. CV. Gita Lentera, 2023.
- Faradilla Herlin, S E, S E Ratih Rosita, and Hasan Basri M E. *Keuangan Daerah*. CV. AZKA PUSTAKA, 2021.
- Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana, 2014.
- Firmansyah, Amrie, M Ak, Gitty Ajeng Triastie, and S Tr Ak. *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?* Penerbit Adab, 2021.
- Firmansyah, Muhamad Ferdy, Yudha Hadian Nur, Alek Surya Nugraha, and Muhammad Ihsaan Rizqulloh. “Mengungkap Keterkaitan Aspek Sosial-Ekonomi Dengan Pembangunan Manusia (Studi Pada Enam Wilayah Pembangunan Jawa Barat).” *Jambura Economic Education Journal* 6, no. 2 (July 1, 2024): 330–49. <https://doi.org/10.37479/jeej.v6i2.24443>.
- Ghasemi, Asghar, and Saleh Zahediasl. “Normality Tests for Statistical Analysis: A Guide for Non-Statisticians.” *International Journal of Endocrinology and Metabolism* 10, no. 2

(2012): 486.

Giroth, Lady Grace Jane, Tiersa Reinie Undap, and Tinneke Evie Meggy Sumual. *Investasi Dalam Human Capital: Kasus Di Kota Manado*. CV. Bintang Semesta Media, 2023.

Goni, Ningsi, Josep Bintang Kalangi, and Krest D Tolosang. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 22, no. 5 (2022): 121–32.

Harahap, Darwis, and S E I Ferri Alfadri. *Ekonomi Mikro Islam*. Merdeka Kreasi Group, 2022.

Heliarta. *Pembangunan Nasional*. Edited by Susilo. Semarang: ALPRIN, 2010.

Idris, H Amiruddin. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Deepublish, 2016.

Ir Sintha Wahjusaputri, M M, and Anim Purwanto. *Statistika Pendidikan: Teori Dan Aplikasi*. CV. Bintang Semesta Media, 2022.

Islam, Ilmu. "Hadits Abu Daud Nomor 1406." Kumpulan Hadis. Accessed November 11, 2024. <https://ilmuislam.id/hadits/1354/hadits-abu-daud-nomor-1406>.

Jawa Tengah, Portal Resmi. "Pj Gubernur Jateng Raih 'Most Inspiring Leader' CNN Indonesia Award 2024." jatengprov.go.id, 2018. <https://jatengprov.go.id/publik/pj-gubernur-jateng-raih-most-inspiring-leader-cnn-indonesia-award-2024/>.

Keuangan, Badan Pengawas. "UU Nomor 13 Tahun 2011." BPK RI. Accessed October 29, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>.

Khusaini, Ivan. "Pembangunan Manusia Indonesia." (*No Title*), n.d.

Kirana, Ika Okta, Zulaini Masruro Nasution, and Anjar Wanto. "Analisis Metode Trend Parabolic Untuk Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia." In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATi)*, 2019.

Kusumaningrum, Ria, Umi Kulsum, and Marsha Siti Aisyah Hafsari. "PERSPEKTIF EKONOMI DAN BISNIS ISLAM MENGENAI PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002-2021." *SAHID BUSINESS JOURNAL* 2, no.

02 (2023): 63–76.

Kusumaningtyas, Eviatiwi, Eko Subagyo, Wahyu Catur Adinugroho, Jufri Jacob, Yunike Berry, Ani Nuraini, and Silvana Syah. *Konsep Dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eview*. Vol. 1. Academia Publication, 2022.

Langoday, Thomas Ola. *Filosofi Dasar Ekonomi Makro: Berpikir Besar Dan Bertindak Besar Di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Lasiyama, Mayasurru. *EKONOMI DAN BISNIS: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*. Vol. 2. Penerbit NEM, 2022.

Maipita, Indra. *Memahami Dan Mengukur Kemiskinan*. Absolute Media, 2013.

Mandey, Dio Refelindo, Daisy S M Engka, and Hanly F Dj Siwu. “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Talaud.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23, no. 1 (2023): 37–48.

Matondang, Zulaika, and Hamni Fadlilah Nasution. *Praktik Analisis Data: Pengolahan Ekonometrika Dengan Eviews Dan SPSS*. Merdeka Kreasi Group, 2022.

Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. *Maqashid Syariah (Konsep, Sejarah Dan Metode)*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Nawawi, Hadari. “Analisis Regresi Dengan MS Excel 2007 Dan SPSS 17.” *PT. Elex Media Komputindo, Jakarta*, 2010.

Oei, Istijanto. “Aplikasi Praktis Riset Pemasaran: Cara Praktis Meneliti Konsumen Dan Pesaing,” 2009.

Panggabean, Meiran, and Eka Ria Lestari Matondang. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017.” *Prosiding SATIESP*, 2019, 154–64.

Panjawa, Jihad Lukis, Retno Sugiharti, and Penerbit Pustaka Rumah. *Pengantar Ekonometrika Dasar Teori Dan Aplikasi Praktis Untuk Sosial-Ekonomi*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta, 2021.

Pinontoan, Marien. “Konsep Dasar Kemiskinan Dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat.”

- Penerbit NEM*, 2020.
- . “Konsep Dasar Kemiskinan Dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Suatu Kajian Teoretis, Pragmatis Dan Holistik.” *PT Nasya Expanding. Nasya Expanding Management*, 2020.
- Pramono, R Widodo Dwi, and Ratna Eka Suminar. *Ekonomi Wilayah Untuk Perencanaan Tata Ruang*. Deepublish, 2019.
- Program, United National Development. “Indeks Pembangunan Manusia (HDI).” United National Development Program. Accessed February 21, 2024. https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index?_gl=1*_1rztrb9*_ga*MjA4MTU4NTkzNy4xNzA4NDg4NjA0*_ga_3W7LPK0WP1*MTcwODQ4ODYwNC4xLjEuMTcwODQ4ODg5Ny41NS4wLjA.#/indicies/HDI.
- Purnasari, Nurwulan. *Metodologi Penelitian*. Guepedia, 2021.
- Putra, Mochammad Dewa Pratama, and Ririt Iriani Sri Setiawati. “PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, JUMLAH PENDUDUK DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN GRESIK.” *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 11, no. 1 (May 31, 2023). <https://doi.org/10.24127/pro.v11i1.7894>.
- Rafsanjani, Haqiqi. *Islamic Human Develepment Index in Indonesia*. UMSurabaya Publishing, 2022.
- Rahardja, Prathama. “Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi Dan Makroekonomi,” 2008.
- Rahman, Muh Fudhail. “Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 2 (November 1, 2015). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2120>.
- Rahmawati, Lilik. “Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam.” *OECONOMICUS Journal of Economics* 1, no. 1 (2016): 21–48.
- Rapii, Muhammad, Huzain Jailani, and Danang Prio Utomo. *Perekonomian Indonesia*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2022.
- Ratna Ekasari, S E. *Pengantar Ekonomi Makro*. AE Publishing, 2023.
- Reni Ria Armayani Hasibuan, M E I, S E I Nurul Jannah, and M E I Angga Syahputra. *EMIS*

- (*Ekonomi Mikro Islam*). Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Rifkhan. *Membaca Hasil Regresi Data Panel*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- . *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel Dan Kuesioner*. Indramayu, Jawa Barat: Cv Adanu Abimata, 2023.
- Ristika, Ema Dian, Wiwin Priana Primandhana, and Mohammad Wahed. “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur.” *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 2 (2021): 129–36.
- Rivaldi, Rifqi. “EKONOMI ISLAM DALAM PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA DAN M. NEJATULLAH SIDDIQI.” *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021): 25–34.
- Rohmi, Misfi Laili, Tiara Juliana Jaya, and Mahfudz Reza Fahlevi. “Pengaruh Pembiayaan Syariah Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh: Analisis Data Panel.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1409–15.
- S, Nia Mari’atus, Teguh Hadi Priyono, and Duwi Yunitasari. “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, UPAH MINIMUM, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013-2019.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 27, no. 2 (August 1, 2022): 259–73. <https://doi.org/10.35760/eb.2022.v27i2.4149>.
- Sadat, Anwar. *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Deepublish, 2022.
- Salam, Agus. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. AZKA PUSTAKA, 2023.
- Samsudin, Harun, DIMAS SADIMAN, and IRWAN P RATU BANGSAWAN. *Kajian Sosial: Menuju Kemiskinan Satu Digit*. Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin, 2020.
- Satria, Dias. *Ekonomi, Uang, Dan Bank: Catatan Teoritis Dan Praktis*. Universitas Brawijaya Press, 2009.
- Seto, Tri Anggoro, and M M SE. *Ekonomi Negara Berkembang Anggota ASEAN Dalam Perspektif Islam*. El-Markazi, 2022.
- Sihombing, Nikous Soter. *Lingkungan Bisnis Eksternal Dan Keunggulan Daya Saing Dalam*

- Kinerja Pemasaran*. Penerbit Widina, 2022.
- Siregar, Abi Pratiwa. *Metode Dan Aplikasi Perhitungan: Pemanfaatan Data Sekunder Di Bidang Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*. UGM PRESS, 2022.
- Siregar, Budi Gautama, and H Ali Hardana. *Metode Penelitian EKonomi Dan Bisnis*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Soelistyo, Aris. *MACROECONOMETRIC MODEL: Kemiskinan, Ketimpangan, Distribusi Pendapatan Dan Kebijakan Macroprudential Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Statistik, Badan Pusat. “Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Jawa Tengah (Tahun).” Badan Pusat Statistik, n.d. <https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTYxIzI=/angka-harapan-hidup-ahh-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-jawa-tengah.html>.
- . “Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Tahun).” Badan Pusat Statistik, n.d. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjMyNCMy/angka-harapan-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.
- . “Indeks Pembangunan Manusia.” Badan Pusat Statistik. Accessed February 21, 2024. <https://tanjabtimkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>.
- . “Kemiskinan.” Badan Pusat Statistik. Accessed March 29, 2024. [https://jakarta.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#:~:text=Dengan pendekatan ini%2C kemiskinan dipandang,perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.](https://jakarta.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#:~:text=Dengan%20pendekatan%20kemiskinan%20dipandang,perkapita%20perbulan%20dibawah%20garis%20kemiskinan.)
- . “Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah).” Badan Pusat Statistik, n.d. <https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU0IzI=/pengeluaran-per-kapita-disesuaikan.html>.
- . “Penyusunan IPM.” Badan Pusat Statistik. Accessed March 17, 2024. <https://brebeskab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab2>.
- . “Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun).” Badan Pusat Statistik, n.d. <https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUxIzI=/rata-rata-lama->

sekolah.html.

Suaib, M Si. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Adab, 2023.

suci Sukmawati, Anastasia, Gusti Rusmayadi, Mekar Meilisa Amalia, Hikmah Hikmah, Nini Apriani Rumata, Ashari Abdullah, Afrina Sari, Dalizanolu Hulu, Ratri Wikaningtyas, and Musran Munizu. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Teori Dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Suharyat, Yayat. *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN*. wawasan Ilmu, n.d.

Sukarniati, Lestari, Firsty Ramadhona Amalia Lubis, and Nurul Azizah Az Zakiyyah. *Ekonomi Pembangunan (Teori Dan Tantangan Di Negara Berkembang)*. UAD PRESS, 2021.

Sukezi, Keppi. *Gender Dan Kemiskinan Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2015.

Susanti, Elva, S E Nurjanna Ladjin, Laila Qadrini, and M Stat. *Buku Ajar Statistika Untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Adab, 2021.

Syamsuri. *Ekonomi Pembangunan Islam (Sebuah Prinsip, Konsep Dan Asas Falsafahnya)*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Manajemen Publik*. Grasindo, 2005.

Tenreng, Mariana, and Arifin Idris. "Ekonomi Makro," 2022.

Toar, Alfian, Jumiati B, and Abdul Wahid Mongkito. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Industri Tebu PT Jhonlin Batu Mandiri Menggunakan Pendekatan Maqashid Syari'ah." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (December 1, 2021): 239–57. <https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1453>.

Ubaidillah, Ahmad. *Ekonomi Pembangunan Islam Untuk Indonesia Emas*. Nawa Litera Publishing, 2023.

Wibowo, Agung Edy. *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*. Penerbit Insania, 2021.

Wijaya, Erric, Degdo Suprayitno, Urwawuska Ladini, Titin Agustin Nengsih, Sumiyarti, Sella Nofriska Sudrimo, Sri Yani Kusumastuti, Nurhayati, and Dalizanolu Hulu. *Buku Ajar Ekonometrika*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Wurarah, Rully, Yudi Siyamto, S E Sy, M E Sy, Ir Ary Subiyantoro, M M SE, S E Syafuruddin, M M Andre Suryaningprang SE, S E Suprianto, and M E Binar Dwiyanto Pamungkas. *Ekonomi Pembangunan*. CV Rey Media Grafika, n.d.

Yam, Jim Hoy. *Non-Performing Loan Dan Bank Sustainability Performance*. Deepublish, 2023.

Yudawisastra, Herlin G., Uli Wildan Nuyanto, Frankie Jan Salean, Luh Diah Citra Resmi Cahyadi, Mudmainna, Fitri Juniwati Ayuningtyas, Dimas Imam Apriliawan, Hotden Leonardo Nainggolan, and Nani Jumanti. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Badung: Intelektual Manifes Media, 2024.

Zainul Bahri, S E, D R Vinni Aprilianti, and M E SSTP. *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, Dan Blue Economy*. Nas Media Pustaka, 2023.

LAMPIRAN I

Data Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen)						
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Cilacap	2.58	2.99	2.27	-10.28	2.15	5.13
Kabupaten Banyumas	6.34	6.45	6.32	-1.65	4.00	5.86
Kabupaten Purbalingga	5.37	5.42	5.64	-1.18	3.19	5.41
Kabupaten Banjarnegara	5.65	5.67	5.60	-1.32	3.26	5.29
Kabupaten Kebumen	5.15	5.53	5.52	-1.45	3.71	5.79
Kabupaten Purworejo	5.27	5.33	5.44	-1.61	3.31	5.36
Kabupaten Wonosobo	4.14	5.06	5.57	-1.64	3.68	5.02
Kabupaten Magelang	5.50	5.28	5.30	-1.67	3.48	5.46
Kabupaten Boyolali	5.80	5.72	5.96	-1.20	4.63	6.33
Kabupaten Klaten	5.34	5.47	5.48	-1.17	3.82	5.9
Kabupaten Sukoharjo	5.76	5.79	5.92	-1.70	3.82	5.61
Kabupaten Wonogiri	5.32	5.41	5.14	-1.41	3.35	5.63
Kabupaten Karanganyar	5.77	5.98	5.76	-1.87	3.57	5.87
Kabupaten Sragen	5.97	5.75	5.90	-1.81	3.75	5.76
Kabupaten Grobogan	5.85	5.83	5.37	-1.57	3.78	5.98
Kabupaten Blora	5.98	4.38	4.05	-4.56	3.68	2.68
Kabupaten Rembang	6.98	5.89	5.20	-1.49	3.85	5.55
Kabupaten Pati	5.67	5.71	5.81	-1.16	3.38	5.56
Kabupaten Kudus	3.21	3.24	3.09	-3.11	-1.54	2.23
Kabupaten Jepara	5.39	5.85	6.02	-1.92	4.63	5.95
Kabupaten Demak	5.82	5.40	5.36	-0.23	2.62	5.25
Kabupaten Semarang	5.65	5.67	5.39	-2.67	3.63	5.31
Kabupaten Temanggung	5.03	5.13	5.05	-2.13	3.34	5.2
Kabupaten Kendal	5.78	5.77	5.71	-1.51	3.89	5.69
Kabupaten Batang	5.55	5.72	5.39	-1.29	4.88	5.97
Kabupaten Pekalongan	5.44	5.76	5.35	-1.89	3.54	5.11
Kabupaten Pemalang	5.61	5.69	5.80	-0.61	4.28	5.08
Kabupaten Tegal	5.38	5.51	5.56	-1.48	3.71	5.14
Kabupaten Brebes	5.65	5.26	5.76	-0.47	2.57	5.61
Kota Magelang	5.42	5.46	5.41	-2.45	3.20	5.77
Kota Surakarta	5.70	5.75	5.78	-1.76	4.01	6.25
Kota Salatiga	5.58	5.84	5.90	-1.68	3.35	5.53
Kota Semarang	6.70	6.48	6.81	-1.85	5.16	5.73
Kota Pekalongan	5.32	5.69	5.50	-1.87	3.59	5.76
Kota Tegal	5.95	5.87	5.77	-2.29	3.12	5.16

Data IPM

Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 - 2022						
Provinsi di Jawa Tengah	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Cilacap	68.9	69.56	69.98	69.95	70.42	70.99
Kabupaten Banyumas	70.75	71.3	71.96	71.98	72.44	73.17
Kabupaten Purbalingga	67.72	68.41	68.99	68.97	69.15	69.54
Kabupaten Banjarnegara	65.86	66.54	67.34	67.45	67.86	68.61
Kabupaten Kebumen	68.29	68.8	69.6	69.81	70.05	70.79
Kabupaten Purworejo	71.31	71.87	72.5	72.68	72.98	73.6
Kabupaten Wonosobo	66.89	67.81	68.27	68.22	68.43	68.89
Kabupaten Magelang	68.39	69.11	69.87	69.87	70.12	70.85
Kabupaten Boyolali	72.64	73.22	73.8	74.25	74.4	74.97
Kabupaten Klaten	74.25	74.79	75.29	75.56	76.12	76.95
Kabupaten Sukoharjo	75.56	76.07	76.84	76.98	77.13	77.94
Kabupaten Wonogiri	68.66	69.37	69.98	70.25	70.49	71.04
Kabupaten Karanganyar	75.22	75.54	75.89	75.86	75.99	76.58
Kabupaten Sragen	72.4	72.96	73.43	73.95	74.08	74.65
Kabupaten Grobogan	68.87	69.32	69.86	69.87	70.41	70.97
Kabupaten Blora	67.52	67.95	68.65	68.84	69.37	69.95
Kabupaten Rembang	68.95	69.46	70.15	70.02	70.43	71
Kabupaten Pati	70.12	70.71	71.35	71.77	72.28	73.14
Kabupaten Kudus	73.84	74.58	74.94	75	75.16	75.89
Kabupaten Jepara	70.79	71.38	71.88	71.99	72.36	73.15
Kabupaten Demak	70.41	71.26	71.87	72.22	72.57	73.36
Kabupaten Semarang	73.2	73.61	74.14	74.1	74.24	74.67
Kabupaten Temanggung	68.34	68.83	69.56	69.57	69.88	70.77
Kabupaten Kendal	70.62	71.28	71.97	72.29	72.5	73.19
Kabupaten Batang	67.35	67.86	68.42	68.65	68.92	69.45
Kabupaten Pekalongan	68.4	68.97	69.71	69.63	70.11	70.81
Kabupaten Pemalang	65.04	65.67	66.32	66.32	66.56	67.19
Kabupaten Tegal	66.44	67.33	68.24	68.39	68.79	69.53
Kabupaten Brebes	64.86	65.68	66.12	66.11	66.32	67.03
Kota Magelang	77.84	78.31	78.8	78.99	79.43	80.39
Kota Surakarta	80.85	81.46	81.86	82.21	82.62	83.08
Kota Salatiga	81.68	82.41	83.12	83.14	83.6	84.35
Kota Semarang	82.01	82.72	83.19	83.05	83.55	84.08
Kota Pekalongan	73.77	74.24	74.77	74.98	75.4	75.9
Kota Tegal	73.95	74.44	74.93	75.07	75.52	76.15

Data Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 - 2022						
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Cilacap	3265399685	3260826229	3584962084	3219631963	2926241152473.80	3402035620730.30
Kabupaten Banyumas	3610994724	3319060759	3725271325	3773568764	3869010672089.00	3600847367173.00
Kabupaten Purbalingga	2149247852	1924908432	2201807611	2104113319	1656401883259.00	2122762527980.00
Kabupaten Banjarnegara	2363699723	2119096683	2222941415	2259878404	1862380616823.00	2039210930404.00
Kabupaten Kebumen	2875505804	2652055178	3021687363	3044056768	2539191003079.00	2824358293725.00
Kabupaten Purworejo	2454019486	2255674841	2282729436	2483287920	1960695827023.00	2347131165050.00
Kabupaten Wonosobo	2007985225	1856167370	2214052791	2070280635	1503729907911.00	2011113250458.00
Kabupaten Magelang	2738920009	2486540561	2797624801	2719200678	1855624889878.00	2570326001677.00
Kabupaten Boyolali	2329840181	2203112762	2513981310	2480627139	2174128154375.00	2471827429489.00
Kabupaten Klaten	2956483629	2973118685	3084765732	2907327298	2338695966596.00	2527619332474.30
Kabupaten Sukoharjo	2443424991	2050161905	2143687570	2401529962	1788713008606.00	2042027814977.00
Kabupaten Wonogiri	2533571009	2246861249	2685943446	2477910262	2072829104871.00	2243214084512.00
Kabupaten Karanganyar	2267508229	2064581558	2469462923	2346436745	1971308204408.00	2203430111176.00
Kabupaten Sragen	2393856680	2236802757	2578755182	2422886893	2007862667154.00	2306325555226.00
Kabupaten Grobogan	2724196340	2345537047	2746493935	2680645523	2177036649493.00	2687129832388.00
Kabupaten Blora	2057569590	2116475561	2322382566	2012812302	2005964123176.00	2396215621703.00
Kabupaten Rembang	1954478076	1814662872	1975181553	2054302198	1592480403713.00	1991790018142.70
Kabupaten Pati	2926635091	2725893398	3091474682	2910220672	2458262822937.00	2717685026789.00
Kabupaten Kudus	2165286082	1957701653	2260081505	1911471464	1682930459995.00	2231500773692.00
Kabupaten Jepara	2394848154	2300574122	2528382702	2399062011	2040851514108.00	2429312218030.00
Kabupaten Demak	2127827629	2050065954	2562454775	2400405766	2103282032921.00	2487342627299.00
Kabupaten Semarang	2287457579	2171799811	2492255493	2457006194	1720213286130.00	2536331344170.00
Kabupaten Temanggung	1902481151	1670309283	1969512901	1996489275	1665343621852.00	1958748409806.00
Kabupaten Kendal	2344630645	2148450040	2440873249	2451834514	1891831983887.00	2499014019249.00
Kabupaten Batang	1669850566	1687193466	1919265838	1925617426	1553228372522.00	1801913436483.00
Kabupaten Pekalongan	2272114708	2160744430	2353391384	2446656142	1842743459171.00	2123953846361.00
Kabupaten Pemasang	2519780578	2324288798	2948441837	2836842885	2238523530513.00	2504262139265.00
Kabupaten Tegal	2583870631	2575620503	2815712481	2905805253	2128086594834.00	2722064917511.00
Kabupaten Brebes	2949813932	2825364002	1102207518	3293494179	2680196723944.00	3091285559556.00
Kota Magelang	1074568603	937345746	2134614681	1006107354	775696191736.00	1039501502733.00
Kota Surakarta	2034646875	1914818394	1186330070	1624395242	1677958718395.00	2088323395600.00
Kota Salatiga	1146473973	923538238	4776442687	1006404906	788177692706.00	932071471274.00
Kota Semarang	4782714421	4506407630	1063652853	5319832790	4123224207055.50	4871946697040.00
Kota Pekalongan	1012635662	883184895	1202471927	1060107482	794921704010.47	1031090188444.00
Kota Tegal	1137698108	916730789	3308888412	1298031100	867706433807.00	1127738112539.00

Data Kemiskinan 2017 – 2022

Provinsi di Jawa Tengah	2017		
	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk miskin	Persentase
Kabupaten Cilacap	1711627	238.3	1.39%
Kabupaten Banyumas	1665025	283.2	1.70%
Kabupaten Purbalingga	916427	171.9	1.88%
Kabupaten Banjarnegara	912917	156.8	1.72%
Kabupaten Kebumen	1192007	233.4	1.96%
Kabupaten Purworejo	714574	98.6	1.38%
Kabupaten Wonosobo	784207	159.2	2.03%
Kabupaten Magelang	1268396	157.2	1.24%
Kabupaten Boyolali	974579	116.4	1.19%
Kabupaten Klaten	1167401	165	1.41%
Kabupaten Sukoharjo	878374	76.7	0.87%
Kabupaten Wonogiri	954706	123	1.29%
Kabupaten Karanganyar	871596	106.8	1.23%
Kabupaten Sragen	885122	124	1.40%
Kabupaten Grobogan	1365207	181	1.33%
Kabupaten Blora	858865	111.9	1.30%
Kabupaten Rembang	628922	115.2	1.83%
Kabupaten Pati	1246691	141.7	1.14%
Kabupaten Kudus	851478	64.4	0.76%
Kabupaten Jepara	1223198	99	0.81%
Kabupaten Demak	1140675	152.6	1.34%
Kabupaten Semarang	1027489	79.7	0.78%
Kabupaten Temanggung	759128	86.8	1.14%
Kabupaten Kendal	957024	106.1	1.11%
Kabupaten Batang	756079	81.5	1.08%
Kabupaten Pekalongan	886197	111.6	1.26%
Kabupaten Pemalang	1296281	225	1.74%
Kabupaten Tegal	1433515	141.8	0.99%
Kabupaten Brebes	1796004	343.5	1.91%
Kota Magelang	121474	10.6	0.87%
Kota Surakarta	516102	54.9	1.06%
Kota Salatiga	188928	9.6	0.51%
Kota Semarang	1757686	80.9	0.46%
Kota Pekalongan	301870	22.5	0.75%
Kota Tegal	248094	20.1	0.81%

Provinsi di Jawa Tengah	2018			2019			2020			2021			2022		
	JP	JP Miskin	Persen	JP	JP Miskin	Persen	JP	JP Miskin	Persen	JP	JP Miskin	Persen	JP	JP Miskin	Persen
Kabupaten Cilacap	1719504	193.2	1.12%	1727098	185.2	1.07%	1944857	198.6	1.02%	1963824	201.71	1.03%	1988622	190.96	0.96%
Kabupaten Banyumas	1679124	226.2	1.35%	1693006	211.6	1.25%	1776918	225.84	1.27%	1789630	232.91	1.30%	1806013	220.47	1.22%
Kabupaten Purbalingga	925193	144.2	1.56%	933989	140.1	1.50%	998561	149.48	1.50%	1007794	153.08	1.52%	1019840	145.33	1.43%
Kabupaten Banjarnegara	918219	141.7	1.54%	923192	136.1	1.47%	1017767	144.95	1.42%	1026866	150.19	1.46%	1038718	141.25	1.36%
Kabupaten Kebumen	1195092	208.7	1.75%	1197982	201.3	1.68%	1350438	211.09	1.56%	1361913	212.92	1.56%	1376825	196.16	1.42%
Kabupaten Purworejo	716477	83.5	1.17%	718316	82.2	1.14%	769880	84.79	1.10%	773588	88.8	1.15%	778257	82.64	1.06%
Kabupaten Wonosobo	787384	138.3	1.76%	790504	131.3	1.66%	879124	137.63	1.57%	886613	139.67	1.58%	896346	128.11	1.43%
Kabupaten Magelang	1279625	143.4	1.12%	1290591	137.4	1.06%	1299859	146.34	1.13%	1305512	154.91	1.19%	1312573	145.33	1.11%
Kabupaten Boyolali	979799	98.2	1.00%	984807	93.7	0.95%	1062713	100.59	0.95%	1070247	104.82	0.98%	1079952	97.18	0.90%
Kabupaten Klaten	1171411	151.7	1.30%	1174986	144.1	1.23%	1260506	151.83	1.20%	1267272	158.23	1.25%	1275850	144.87	1.14%
Kabupaten Sukoharjo	885205	65.4	0.74%	891912	63.6	0.71%	907587	68.89	0.76%	911603	73.84	0.81%	916627	68.72	0.75%
Kabupaten Wonogiri	957106	102.8	1.07%	959492	98.3	1.02%	1043177	104.37	1.00%	1049292	110.46	1.05%	1057087	105.19	1.00%
Kabupaten Karanganyar	879078	87.8	1.00%	886519	84.5	0.95%	931963	91.72	0.98%	938808	95.41	1.02%	947642	88.56	0.93%
Kabupaten Sragen	887889	116.4	1.31%	890518	113.8	1.28%	976951	119.38	1.22%	983641	122.91	1.25%	992243	115.14	1.16%
Kabupaten Grobogan	1371610	168.7	1.23%	1377788	161.9	1.18%	1453526	172.26	1.19%	1460873	175.72	1.20%	1470150	163.2	1.11%
Kabupaten Blora	862110	102.5	1.19%	865013	97.9	1.13%	884333	103.73	1.17%	886147	107.05	1.21%	888224	99.83	1.12%
Kabupaten Rembang	633584	97.4	1.54%	638188	95.3	1.49%	645333	100.08	1.55%	647766	101.4	1.57%	650770	94.56	1.45%
Kabupaten Pati	1253299	123.9	0.99%	1259590	119	0.94%	1324188	127.37	0.96%	1330983	128.74	0.97%	1339572	118.04	0.88%
Kabupaten Kudus	861430	60	0.70%	871311	58	0.67%	849184	64.24	0.76%	852443	67.06	0.79%	856472	66.06	0.77%
Kabupaten Jepara	1240600	86.5	0.70%	1257912	83.5	0.66%	1184947	91.14	0.77%	1188510	95.22	0.80%	1192811	89.08	0.75%
Kabupaten Demak	1151796	144.1	1.25%	1162805	137.6	1.18%	1203956	146.87	1.22%	1212377	151.74	1.25%	1223217	143.01	1.17%
Kabupaten Semarang	1040629	75.7	0.73%	1053786	73.9	0.70%	1053094	79.88	0.76%	1059844	83.61	0.79%	1068492	78.6	0.74%
Kabupaten Temanggung	765594	75.4	0.98%	772018	72.6	0.94%	790174	77.33	0.98%	794403	79.09	1.00%	799764	73.04	0.91%
Kabupaten Kendal	964106	94.7	0.98%	971086	91.2	0.94%	1018505	97.49	0.96%	1025020	100	0.98%	1033367	93.03	0.90%
Kabupaten Batang	762377	66.1	0.87%	768583	64.1	0.83%	801718	70.57	0.88%	807005	74.91	0.93%	813791	69.94	0.86%
Kabupaten Pekalongan	891892	89.5	1.00%	897711	87	0.97%	968821	91.86	0.95%	976504	95.26	0.98%	986455	87.53	0.89%
Kabupaten Pemalang	1299724	208.3	1.60%	1302813	200.7	1.54%	1471489	209.03	1.42%	1484209	215.08	1.45%	1500754	195.84	1.30%
Kabupaten Tegal	1437225	114.1	0.79%	1440698	109.9	0.76%	1596996	117.5	0.74%	1608611	123.52	0.77%	1623595	113.62	0.70%
Kabupaten Brebes	1802829	309.2	1.72%	1809096	293.2	1.62%	1978759	308.78	1.56%	1992685	314.95	1.58%	2010617	290.66	1.45%
Kota Magelang	121872	9.6	0.79%	122111	9.1	0.75%	121526	9.27	0.76%	121610	9.44	0.78%	121675	8.65	0.71%
Kota Surakarta	517887	47	0.91%	519587	45.2	0.87%	522364	47.03	0.90%	522728	48.78	0.93%	523008	45.94	0.88%
Kota Salatiga	191571	9.2	0.48%	194084	9.2	0.47%	192322	9.69	0.50%	193525	10.14	0.52%	195065	9.45	0.48%
Kota Semarang	1786114	73.6	0.41%	1814110	72	0.40%	1653524	79.58	0.48%	1656564	84.45	0.51%	1659975	79.87	0.48%
Kota Pekalongan	304477	20.5	0.67%	307097	20.2	0.66%	307150	22.16	0.72%	308310	23.49	0.76%	309742	21.81	0.70%
Kota Tegal	249003	19.4	0.78%	249905	18.6	0.74%	273825	19.55	0.71%	275781	20.27	0.74%	278299	19.78	0.71%

Data IPM di Pulau Jawa

No	Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	D.I Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
1	2017	80,06	70,69	70,52	78,89	70,27	71,42
2	2018	80,47	71,3	71,12	79,53	70,77	71,95
3	2019	80,76	72,03	71,73	79,99	71,5	73,44
4	2020	81,92	72,61	71,88	79,95	73,04	74,41
5	2021	82,85	72,96	72,17	80,22	73,48	74,68
6	2022	82,77	73,63	72,8	80,65	74,05	75,25

LAMPIRAN II

Hasil Uji Regresi Data Panel Eviews 10

Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	1.078571	3.888762	72.37329	7.22E+11
Median	1.025000	5.335000	71.30500	2.72E+09
Maximum	2.030000	6.980000	84.35000	4.87E+12
Minimum	0.400000	-10.28000	64.86000	8.83E+08
Std. Dev.	0.334968	2.890511	4.452513	1.11E+12
Skewness	0.342937	-1.689680	0.899755	1.215865
Kurtosis	2.640142	5.505378	3.316417	3.364777
Jarque-Bera	5.249307	154.8487	29.21064	52.90573
Probability	0.072465	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	226.5000	816.6400	15198.39	1.52E+14
Sum Sq. Dev.	23.45057	1746.206	4143.398	2.55E+26
Observations	210	210	210	210

Hasil Uji Pendeatan Regresi Data Panel

Common Effect Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/24 Time: 14:02

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.37306	1.208267	14.37850	0.0000
X1	0.007548	0.005924	1.274153	0.2040
LOG(X2)	-3.807740	0.283851	-13.41459	0.0000
LOG(X3)	-0.001120	0.005319	-0.210656	0.8334
R-squared	0.471650	Mean dependent var	1.078571	
Adjusted R-squared	0.463956	S.D. dependent var	0.334968	
S.E. of regression	0.245247	Akaike info criterion	0.045763	
Sum squared resid	12.39010	Schwarz criterion	0.109517	
Log likelihood	-0.805073	Hannan-Quinn criter.	0.071536	
F-statistic	61.29778	Durbin-Watson stat	0.122426	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/24 Time: 14:04

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45.25753	3.116186	14.52337	0.0000
X1	-0.003065	0.001842	-1.664176	0.0979
LOG(X2)	-10.40533	0.737944	-14.10043	0.0000
LOG(X3)	0.015459	0.002392	6.462683	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.967469	Mean dependent var	1.078571
Adjusted R-squared	0.960471	S.D. dependent var	0.334968
S.E. of regression	0.066598	Akaike info criterion	2.417982
Sum squared resid	0.762879	Schwarz criterion	1.812315
Log likelihood	291.8881	Hannan-Quinn criter.	2.173133
F-statistic	138.2488	Durbin-Watson stat	1.058978
Prob(F-statistic)	0.000000		

Random Effect Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/02/24 Time: 14:05

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 210

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficien			
	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.06424	2.116619	14.20390	0.0000
X1	0.000767	0.001751	0.438363	0.6616
LOG(X2)	-6.807170	0.501094	-13.58462	0.0000
LOG(X3)	0.006140	0.001937	3.170345	0.0018

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.238232	0.9275
Idiosyncratic random	0.066598	0.0725

Weighted Statistics

R-squared	0.510500	Mean dependent var	0.122300
Adjusted R-squared	0.503371	S.D. dependent var	0.103869
S.E. of regression	0.073199	Sum squared resid	1.103761
F-statistic	71.61252	Durbin-Watson stat	0.877295
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.182185	Mean dependent var	1.078571
Sum squared resid	19.17823	Durbin-Watson stat	0.050491

Hasil Uji Pemilihan Model

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	77.102747	(34,172)	0.0000
Cross-section Chi-square	585.38628334		0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/24 Time: 14:08

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.37306	1.208267	14.37850	0.0000
X1	0.007548	0.005924	1.274153	0.2040
LOG(X2)	-3.807740	0.283851	-13.41459	0.0000
LOG(X3)	-0.001120	0.005319	-0.210656	0.8334

R-squared	0.471650	Mean dependent var	1.078571
Adjusted R-squared	0.463956	S.D. dependent var	0.334968
S.E. of regression	0.245247	Akaike info criterion	0.045763
Sum squared resid	12.39010	Schwarz criterion	0.109517
Log likelihood	-0.805073	Hannan-Quinn criter.	0.071536
F-statistic	61.29778	Durbin-Watson stat	0.122426
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	45.855798	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.003065	0.000767	0.000000	0.0000
LOG(X2)	10.405334	-6.807170	0.293467	0.0000
LOG(X3)	0.015459	0.006140	0.000002	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/24 Time: 14:12

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficien			
	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45.25753	3.116186	14.52337	0.0000
X1	-0.003065	0.001842	-1.664176	0.0979
LOG(X2)	-10.40533	0.737944	-14.10043	0.0000
LOG(X3)	0.015459	0.002392	6.462683	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.967469	Mean dependent var	1.078571
Adjusted R-squared	0.960471	S.D. dependent var	0.334968

S.E. of regression	0.066598	Akaike info criterion	2.417982
Sum squared resid	0.762879	Schwarz criterion	1.812315
Log likelihood	291.8881	Hannan-Quinn criter.	2.173133
F-statistic	138.2488	Durbin-Watson stat	1.058978
Prob(F-statistic)	0.000000		

Estimasi Model

Estimation Command:

=====

LS(CX=F) Y C X1 LOG(X2) LOG(X3)

Estimation Equation:

=====

$Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*LOG(X2) + C(4)*LOG(X3) + [CX=F]$

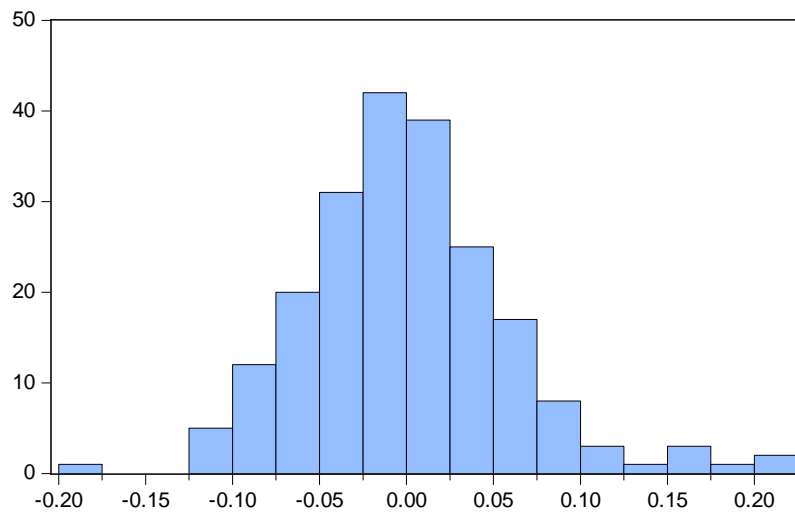
Substituted Coefficients:

=====

$Y = 45.2575297317 - 0.00306501863139*X1 - 10.4053342793*LOG(X2) + 0.0154591032815*LOG(X3) + [CX=F]$

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Series: Standardized Residuals
Sample 2017 2022
Observations 210

Mean 4.89e-18
Median -0.002776
Maximum 0.220892
Minimum -0.186519
Std. Dev. 0.060416
Skewness 0.635225
Kurtosis 4.584748

Jarque-Bera 36.09786
Probability 0.000000

Uji Multikolinearitas

	X1	LOG(X2)	LOG(X3)
X1	1.000000	0.009312	0.136056
LOG(X2)	0.009312	1.000000	0.105531
LOG(X3)	0.136056	0.105531	1.000000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Oktavia Nur Fadhillia
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 1 Oktober 2003
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
No. Handphone : 089619597942
Email : oktavianfadhillia@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Kedungpane 01 (2009 – 2015)
2. SMPN 41 Semarang (2015 – 2018)
3. SMAN 07 Semarang (2018 – 2021)

Semarang, 12 Desember 2024

Penulis

Oktavia Nur Fadhillia